

**ANALISIS KEBIJAKAN PELESTARIAN *REPONG DAMAR*  
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**  
(Studi terhadap agenda setting repong damar sebagai upaya melestarikan  
pohon damar dan menjaga kesejahteraan petani damar)

(Skripsi)

Oleh  
**Iyaji Kolbinur**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016

## **ABSTRACT**

### **A POLICY ANALYSIS RESIN PRESERVATION IN PESISIR BARAT REGENCY**

(The study of agenda setting resin as an effort to preserve resin and safeguarding the welfare of resin farmers)

**BY**

**IYAJI KOLBINUR**

Pesisir Barat Regency has a natural resource of resin tree latex which the best quality in the world. But currently, the number of resin trees decrease caused by continues logging. Refer to the problems, the Local Government of Pesisir Barat Regency has put into agenda the issues relate to conservation policies of resin in that Region.

The purpose of this research is Gaining knowledge about agenda setting theory relate to the issue of preservation and welfare of the resin farming community in the Pesisir Barat Regency. This research is a descriptive study with qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis was performed with data reduction, data presentation and conclusion or verification.

The process of agenda setting policy relate to the preservation of resin has been ideal and contains policy values. Actors involved have been fulfilled who are official and unofficial actors. The local government plays an active role in defining the problem and determining the objectives. In addition to that the process is also dominated by the values of the policy. The recommendations can be given are : 1) to build an intensive communication between the Department of Forestry and Agriculture and Local Legislative (DPRD) of Pesisir Barat Regency, 2) the issue of resin conservation should be shortly formulated.

**Key words:** *Public Policy, Agenda Setting*

## ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PELESTARIAN *REPONG* DAMAR  
DI KABUPATEN PESISIR BARAT  
(Studi terhadap agenda setting repong damar sebagai upaya melestarikan  
pohon damar dan menjaga kesejahteraan petani damar)

Oleh

IYAJI KOLBINUR

Kabupaten Pesisir Barat memiliki kekayaan alam berupa getah pohon damar dengan kualitas terbaik di dunia. Namun saat ini, keberadaan pohon-pohon damar menurun disebabkan penebangan yang terus menerus dilakukan. Mengacu pada permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat mengagendakan isu terkait kebijakan pelestarian *repong* damar di Kabupaten Pesisir Barat.

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan pengetahuan mengenai teori *agenda setting* terhadap isu pelestarian dan kesejahteraan masyarakat petani damar di Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Proses *agenda setting* terkait kebijakan pelestarian *repong* damar ini sudah ideal dan mengandung nilai kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat telah terpenuhi, yakni *official actors* dan *unofficial actors*. Pemerintah daerah berperan aktif dalam mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan-tujuan. Selain itu, didominasi dengan nilai kebijakan dalam prosesnya. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah: 1) komunikasi intensif antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan DPRD Kabupaten Pesisir Barat dapat terjalin dengan baik, 2) isu kebijakan pelestarian *repong* damar di Kabupaten Pesisir Barat dapat segera diformulasi.

**Kata Kunci:** *Kebijakan Publik, Agenda Setting*

**ANALISIS KEBIJAKAN PELESTARIAN *REPONG* DAMAR  
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**  
(Studi terhadap agenda setting repong damar sebagai upaya melestarikan  
pohon damar dan menjaga kesejahteraan petani damar)

Oleh  
**Iyaji Kolbinur**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA  
pada  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016

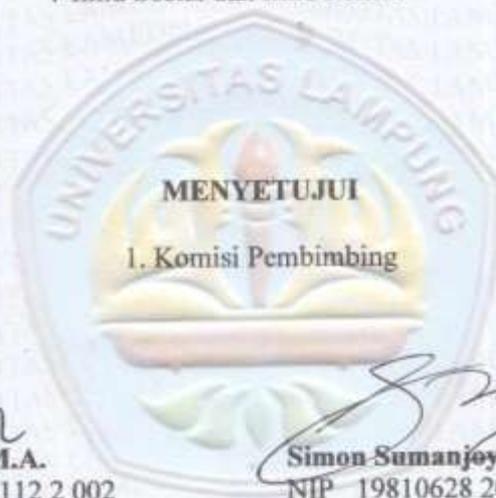
Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN PELESTARIAN *REPONG* DAMAR DI KABUPATEN PESISIR BARAT (Studi Terhadap Agenda Setting Repong Damar Sebagai Upaya Melestarikan Pohon Damar dan Menjaga Kesejahteraan Petani Damar)**

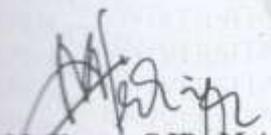
Nama Mahasiswa : **Iyaji Kofbinur**

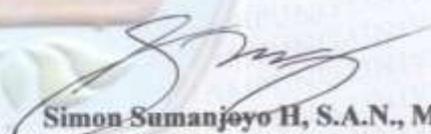
No. Pokok Mahasiswa : 1216041055

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

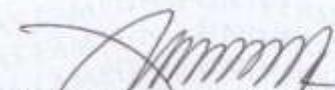
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



  
**Meliyana, S.IP., M.A.**  
NIP 19740520 200112 2 002

  
**Simon Sumanjaya H, S.A.N., M.A.P.**  
NIP 19810628 200501 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

  
**Dr. Deddy Hermawan, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19750720 200312 1 002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Meiliyana, S.IP., M.A.**



Sekretaris : **Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.A.P.**



Penguji Utama : **Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dr. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.**  
NIP. 19580109 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Juni 2016**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 13 Juni 2016

Yang membuat pernyataan



Iyaji Kolbinur  
NPM. 1216041055

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Iyaji Kolbinur, dilahirkan di Kota Krui, Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 29 November 1994 merupakan putra dari pasangan Bapak Hapzi Mayadana dan Ibu Marlinda Wati. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah lulus dari Taman Kanak-Kanak Aisyah Krui pada tahun 2000, SDN 01 Pasar Krui yang ditamatkan pada tahun 2006. Setelah menamatkan pendidikan SD, penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 2 Pesisir Tengah Krui dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pesisir Tengah dan lulus di tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur tertulis SBMPTN.

Selama perkuliahan penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Tahun 2013 menjadi anggota Sumber Daya Organisasi HIMAGARA FISIP UNILA. Pada tahun 2014 penulis menjadi Asisten I Hubungan Dalam BEM FISIP UNILA periode 2014/2015. Penulis juga merupakan salah satu pencetus pada sebuah

organisasi kedaerahan yakni HMPPB (Himpunan Mahasiswa Pemuda Pesisir Barat) dan menjabat sebagai Ketua Umum HMPPB periode 2015/2016. Pada tahun 2015 penulis mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik di Desa Bina Bumi Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang.

## **MOTTO**

*"man jaddah wajadah, selama kita bersungguh-sungguh, maka kita akan memetik buah yang manis. Segala keputusan hanya ditangan kita sendiri, kita mampu untuk itu "*

**(B.J HABIBIE)**

*"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan saya percaya pada diri saya sendiri "*

**(MUHAMMAD ALI)**

*"Sekolah terbaik adalah sekolah kehidupan, kosongkanlah botol mu terlebih dulu setiap bertemu orang baru maka akan semakin banyak ilmu yang kamu raih."*

**(IYAJI KOLBINUR)**

*"Langkah selalu diukur untuk kedepan, karena hakikatnya kita akan terus maju. Namun jangan pernah segan untuk melangkah mundur ketika kita tau tujuan kita tidak di depan"*

**(IYAJI KOLBINUR)**

## PERSEMBAHAN

*Dengan segala kerendahan hati dan ucapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah NYA kupersembahkan karya sederhanaku ini untuk:*

*Ayahaku Hapzi Mayadana dan Ibuku Marlinda wati*

*Terima kasih untuk doa yang tidak pernah putus  
Terima kasih untuk pengorbanan dan perjuangan yang kalian berikan untukku  
Terima kasih atas kasih sayang yang sungguh luar biasa selama ini  
Terima kasih untuk semua yang tak mungkin terbalas dengan apapun,  
Rasanya sejuta ucapan terima kasih tidaklah cukup, untuk menggantikan segala yang kalian berikan,,,  
Semoga Allah membalas kebaikan kalian dan semoga kalian senantiasa sehat serta selalu dalam lindungan-Nya ...Aamiin.*

*Seluruh Keluarga Besarku Tanpa Terkecuali, Sahabat,  
Teman-Temanku, Kakak Tingkat dan Adik Tingkat  
yang Selalu mendukungku.*

*Putri Dhea Astuti*

*Kamu telah menjadi bagian keseharianku dari setiap proses kehidupan yang kujalani...  
Terima kasih untuk segalanya,  
Doa, perhatian, cinta, dan kasih sayang serta kesetiaan yang hingga kini tetap kau jaga...  
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan untuk kita menggapai asa yang masih dalam proses menjadi kenyataan...Aamiin*

*Almamater Tercinta Universitas Lampung*

## SANWACANA

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa member rahmat serta nikmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Kebijakan Pelestarian Repong Damar Di Kabupaten Pesisir Barat (Studi terhadap agenda setting repong damar sebagai upaya melestarikan pohon damar dan menjaga kesejahteraan petani damar)**" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Selama menyusun skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Berbagai dorongan dan motivasi yang penulis dapatkan dari berbagai pihak telah mampu memberikan rasa semangat juang kepada diri penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam menyusun skripsi ini antara lain:

1. Kedua orang tuaku Ayah Hapzi Mayadana dan Ibu Marlinda Wati yang selalu memberikan doa, motivasi, pengorbanan, semangat yang sangat luar biasa kepadaku. Ibu yang selalu mengingatkan untuk selalu dekat dengan

Allah SWT dengan rajin shalat 5 waktu, dan berdoa. Semoga ini menjadi tahapan yang indah bagi penulis untuk dapat membahagiakan kalian dikemudian hari. Terima kasih untuk segalanya yang telah diberikan, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat dan rahmat yang begitu indah disetiap waktu-Nya. Aamiin Ya Allah Ya Rabbal' alamin.

2. Dongan Miza, Wo Nevia, Adik-adikku Tirta Mahardika, Satria Iswadi, Irfan Darmawan. Terima kasih untuk semangat yang telah diberikan.
3. Ibu Meliyana, S.IP.,M.A selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan kritik dan saran serta arahnya kepada penulis dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Terimakasih bu atas saran, waktu, perhatian dan motivasinya yang sangat membangun.
4. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA., selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terimakasih atas ilmu, bimbingan, dan kesabarannya selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku dosen pembahas skripsi. Terimakasih atas segala arahan, kritik dan masukan yang telah diberikan.
6. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
8. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan masukan dan motivasinya untuk penulis.

9. Ibu Nur selaku Staf Administrasi yang banyak membantu kelancaran administrasi skripsi ini.
10. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala ilmu yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan peneliti ke depannya.
11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat yang telah memberikan izin penelitian, khususnya kepada Bapak Ir. Ruskan Efendi selaku Kepala Dinas dan Bapak Imam Habibudin, M.Si selaku Sekretaris Dinas juga Bapak Sapuan S.P selaku kepala bidang pengusahaan hutan yang telah membantu penulis demi kelancaran penelitian.
12. Terimakasih kepada Bapak Ali Yudiem S.H selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pesisir Barat atas informasi yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Bapak A Kholiswan selaku Ketua PMPRD (Persatuan Masyarakat Petani Repong Damar) atas data dan informasi yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.
14. Sahabat sekaligus keluargaku KHANSTYA BILOVILIA yang tak tergantikan: Eko Santoso P, Neng Via, Kakak Tertua PW, Yeni, Riris, Cia unyil. Terimakasih untuk kebersamaannya serta warna kehidupan yang kalian berikan selama persahabatan kita. Semoga kita bisa terus menjaga silaturahmi sampai tua nanti dan sukses untuk kita semua.
15. Teman-teman MABES C10: Alli, Bayu, Bery, Sukoi, Zulfikar, Satrio, Icup, Ipul dkk. Terimakasih sudah menjadi bagian kisah dari perkuliahan dan memberikan pengalaman selama ini.

16. Terimakasih kepada Stephani Wulandari S.A.N yang telah banyak membantu, memberikan semangat, pengalaman, ilmu, serta motivasi selama proses skripsi ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
17. Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2012 AMPERA. Ucapan terimakasih yang tulus dari hati tercurahkan untuk kalian: Mbak Mona, Anisa Rahmawati, Dian Kharisma, Novaria, Ikwan Arifan, Sherlyani, Eko, Sholeh, Suci, Erna, Yuli, Mba Ana, Anggi, Azizah, Dara, Frisca, Pewe, Pur, Dila, Akbar, Lianse, Putu, Bety, Novi, dan teman-teman sekalian yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
18. Teman- teman KKN: Dianita Ananda, Fitra, Nisa, Yeni, Mba Tri, Juju, dan Korcam Ferdinan. Terimakasih atas kebersamaan, pengalaman, dan pelajaran kurang lebih 40 hari, serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
19. Keluargaku HMPPB kepengurusan 2015/2016: Afat, Indra, bendum Susi, Reza, Ridho, Brisca, Leo, Tia, Azmi, Fini, Ando, Sansan, Roby. Terimakasih pengalaman serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kita semua bisa menjadi satu-kesatuan.
20. Setiap rekan di luar sana yang penulis tidak ketahui persis dalam hal identitas, namun pernah bertemu, berbincang, berdiskusi dan membagikan informasi-informasi yang telah membantu penulis dalam menambah ilmu pengetahuan, terimakasih.
21. Terkhusus untuk satu wanita yang selalu memberikan dorongan semangat dalam perjalanan hidup penulis selama ini yaitu **Putri Dhea Astuti**. Tidak hanya di sanwacana ini nama-mu berada di akhir, namun di hati ini juga insyaallah menjadi yang terakhir. Terimakasih untuk segalanya.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis secara pribadi maupun mereka yang telah menyediakan waktu dan sempat untuk membacanya.

Bandar Lampung, 13 Juni 2016

Penulis,

**Iyaji Kolbinur**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka pikir penelitian.....	38
2. Struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan.....	51
3. Susunan personalia komisi B DPRD .....	57
4. Struktur pengurus PMPRD Kabupaten Pesisir Barat.....	65
5. Peta sebaran <i>repong</i> damar.....	81

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>iii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	11
1. Pengertian Kebijakan publik .....	11
2. Proses Kebijakan Publik.....	12
B. Tinjauan Analisis Kebijakan Publik .....	13
1. Definisi Analisis Kebijakan Publik .....	13
2. Proses Analisis Kebijakan Publik.....	17
C. Tinjauan tentang <i>Agenda setting</i> Kebijakan .....	19
1. Isu Kebijakan Publik .....	19
2. Pengertian Agenda Setting .....	21
3. Tahap-Tahap <i>Agenda setting</i> Kebijakan .....	24
4. Aktor-aktor dalam <i>Agenda setting</i> .....	28
5. Nilai-nilai yang Berpengaruh dalam <i>Agenda Setting</i> .....	31
D. Tinjauan terhadap <i>repong damar</i> .....	34
E. Kerangka Pikir .....	36
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Tipe Penelitian .....	39
B. Fokus penelitian.....	40
C. Lokasi penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	45

<b>IV.</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
	A. Gambaran Kabupaten Pesisir Barat.....	47
	B. Gambaran Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan .....	49
	1. Visi dan Misi.....	49
	2. Susunan Organisasi .....	50
	C. Gambaran DPRD Kabupaten Pesisir Barat .....	52
	D. Gambaran PMPRD Kabupaten Pesisir Barat .....	57
	1. Visi dan Misi.....	58
	2. Bidang Program PMPRD.....	58
	3. Kegiatan PMPRD.....	58
	4. Susunan Organisasi.....	64
<b>V.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
	A. Hasil Penelitian.....	68
	A.1 Aktor-aktor yang terlibat dalam proses <i>agenda setting</i> .....	68
	A.1.1 <i>Official Actors</i> .....	71
	A.1.2 <i>Unofficial Actors</i> .....	79
	A.2 Tindakan Pemerintah Terhadap Isu Pelestarian <i>Repong Damar</i> ....	83
	A.2.1 Peran Pemerintah Daerah .....	83
	A.2.2 Nilai-nilai .....	86
	B. Pembahasan Penelitian .....	93
	B.1 Aktor-aktor yang terlibat dalam proses <i>agenda setting</i> .....	93
	B.1.1 <i>Official Actors</i> .....	93
	B.1.2 <i>Unofficial Actors</i> .....	97
	B.2 Tindakan Pemerintah Terhadap Isu Pelestarian <i>Repong Damar</i> ...	102
	B.2.1 Peran Pemerintah Daerah... ..	102
	B.2.2 Nilai-nilai .....	105
<b>VI.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	107
	B. Saran.....	108

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Produksi getah damar di tahun 2004-2009.....	6
2. Gambaran produksi <i>repong</i> damar.....	7
3. Nama, luas wilayah dan jumlah pekon per-kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat.....	48
4. Daftar anggota PMPRD di Kabupaten Pesisir Barat.....	66

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah kebijakan merupakan suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat sehingga membutuhkan solusi yang segera. (Anderson dalam Wahab 2012:96). Dalam analisis kebijakan publik konsep ini menempati posisi sentral. Hal ini mungkin ada kaitannya dengan fakta bahwa kesadaran akan adanya masalah tertentu. Dimulainya proses pembuatan kebijakan publik juga bisa berlangsung karena adanya masalah tertentu yang sudah lama dipresepsikan sebagai “belum pernah tersentuh” atau ditanggulangi lewat kebijakan pemerintah. Pada titik ini mulai membangkitkan tingkat perhatian tertentu.

Proses pembuatan kebijakan publik di sistem politik mana pun lazimnya berangkat dari adanya tingkat kesadaran tertentu atas suatu masalah atau isu tertentu. Selain itu juga, untuk mengetahui tingkat relatif demokratis atau tidaknya suatu sistem politik, diantaranya dapat diukur dari cara bagaimana mekanisme mengalirnya isu menjadi agenda kebijakan pemerintah, dan akhirnya menjadi kebijakan publik. Kenyataannya tidak semua isu yang pernah atau sedang berkembang ditengah-tengah masyarakat kemudian secara otomatis menjadi kebijakan publik.

Tahap penyusunan agenda sendiri menarik karena merupakan tahap yang cukup krusial di mana adakalanya sebuah isu hangat yang dianggap penting segera mendapat perhatian. Isu seperti ini kemudian menjadi agenda kebijakan yang akan dibicarakan oleh para aktor kebijakan formal. Namun ada saatnya pula di mana sebuah isu hangat kemudian mendingin dan pada akhirnya dilupakan. Agar masalah dapat dipecahkan dengan suatu kebijakan publik, masalah publik tadi menuntut adanya perumusan masalah dengan baik dan benar. Hal itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ackoff dalam Widodo (2013:51) bahwa keberhasilan dalam memecahkan masalah menghendaki ditemukannya pemecahan yang benar atas masalah yang benar. Kegagalan sering terjadi karena kita memecahkan masalah yang salah daripada mendapatkan pemecahan yang salah terhadap masalah yang benar.

Seperti yang dikemukakan oleh Solesbury dalam Parson (20014:119) yang menjelaskan bahwa sebuah isu hanya mulai tampak penting ketika sebuah institusi di dalam sistem politik menjadi terkait dengan isu tersebut. Dia berpendapat bahwa hal seperti ini terjadi berkenaan dengan isu lingkungan pada 1970-an ketika pemerintah mulai mempertimbangkan masalah "lingkungan". Karena itu kemajuan sebuah isu dibentuk oleh tingkat kekhususannya: yakni, sejauh mana isu tersebut diperkuat oleh suatu kejadian atau peristiwa. Dalam kasus lingkungan, hal ini tampak jelas. Pasang surut perhatian terhadap isu ini selalu berkaitan dengan kejadian bencana dan jenis-jenis "krisis" lainnya. Akan tetapi, kekhususan tidak cukup membuat isu untuk menjadi diperhatikan. Isu itu harus punya legitimasi. Ia harus sesuai dan berkaitan dengan, nilai-nilai yang berlaku dan

dominan. Karenanya, isu harus mendapat perhatian publik, legitimasi, dan perhatian pemerintah agar isu itu memunculkan tindakan publik.

Seperti halnya isu pelestarian *repong* damar yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Selama ini isu pelestarian *repong* damar telah menjadi perhatian banyak pihak karena keberadaannya yang terancam punah akibat penebangan yang terus-menerus dilakukan sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai membahasnya dalam *agenda setting* kebijakan. Isu mengenai damar merupakan isu lingkungan dan berkaitan dengan ekonomi masyarakat sehingga sangat sensitif dan telah lama menjadi perhatian banyak pihak. *Agenda setting* sendiri merupakan sebuah langkah awal dari keseluruhan tahapan dalam proses perumusan kebijakan pelestarian *repong* damar. Sehingga *agenda setting* dalam proses perumusan kebijakan pelestarian *repong* damar menjadi tahap yang sangat penting dalam analisis kebijakan. *Agenda setting* merupakan tahap penjabaran tahapan kebijakan lainnya. Didalam masalah kebijakan dan *agenda setting* ini nantinya akan dapat diketahuai kearah mana kebijakan mengenai pelestarian *repong* damar yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat apakah berpihak kepada masyarakat atau sebaliknya. Sebelumnya Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dalam kunjungan kerjanya pada bulan September 2010 lalu mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat edaran yang melarang penebangan pohon damar. Selain itu juga, pernyataan dari pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2015 melalui PJ.Bupati Qodratul ikhwan mengungkapkan bahwa:

“...untuk memperkuat surat edaran pelarangan penebangan pohon damar tersebut. Maka kemudian mengusulkan perlindungan dan pelestarian

*repong* damar yang akan diproses bersama dalam bentuk sebuah produk kebijakan nantinya.”

(<http://www.lampost.co/berita/populasi-pohon-damar-di-pesisir-barat-terus-menyusut> di akses 29 Agustus 2015 Pukul 23:00)

*Repong* sendiri merupakan istilah masyarakat Krui di Kabupaten Pesisir Barat untuk menamakan kebun yang ditanami dan ditumbuhi berbagai jenis tanaman kayu dan buah-buahan. Jenis tanaman kayu yang ditanam merupakan jenis kayu keras dan berumur panjang. *Repong* merupakan hasil akhir dari pengolahan lahan hutan menjadi lahan pertanian yang tentunya melalui proses yang panjang. Tradisi pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat Krui secara garis besar dapat dibedakan atas tiga fase produktif, yaitu fase (1) *darak*, (2) *kebun*, (3) *repong* (Lubis, 1997:6). Dalam proses pengelolaan atau pemanfaatan *repong* pada akhirnya memunculkan tanaman yang mendominasi jumlahnya yakni *repong* damar. *Repong* damar adalah suatu sistem pengelolaan tanaman perkebunan yang ekosistemnya merupakan hamparan tanaman yang membentuk suatu hutan yang dibudidayakan dan dikelola oleh masyarakat (Nainggolan, 2011:39).

*Repong* damar tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Krui Kabupaten Pesisir Barat. Sudah sejak 100 tahun lebih, warga di pesisir pantai yang menghadap Samudera Hindia ini membudidayakan pohon penghasil getah itu. Dari 70 desa yang tersebar di sepanjang Pesisir Krui, hanya 13 desa yang tidak memiliki *repong* damar. Lebih dari separuh penduduk Pesisir Krui terlibat dalam produksi damar. Baik sebagai pemilik *repong*, pedagang pengumpul, kuli angkut, pedagang besar damar, pengusaha angkutan, maupun buruh sortir. Maka tidak mengherankan 80 persen produksi resin damar Indonesia yang mencapai 10 ribu ton per tahun berasal dari Pesisir Krui. Damar mata kucing yang dihasilkan para

petani damar di Krui merupakan yang paling banyak dicari pengeksport, sebab getah yang dihasilkan berkualitas tinggi.

Dari sisi lingkungan hidup, eksistensi *repong* damar sungguh tidak bisa dianggap gampang. Kawasan yang membentuk hutan itu berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan penstabil iklim. *Repong* damar selama ini berguna sebagai zone penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Berderet-deret pohon damar berdiri gagah, menjulang dengan rimbun. Sementara di belakangnya menghampar kawasan TNBBS, tempat konservasi aneka flora dan fauna. Orang akan menyangka *repong-repong* damar itu hutan alam bagian dari kawasan TNBBS. Namun kenyataannya berada di luar kawasan konservasi.

*Repong* damar yang ada di Kabupaten Pesisir Barat merupakan contoh keberhasilan sistem yang dirancang dan dilaksanakan sendiri oleh penduduk setempat dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari dan menguntungkan. Sistem ini cukup unik karena nyaris sempurna mengkonstruksi ekosistem hutan alam di lahan-lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa ekologi pohon damar sebagai sumberdaya ekonomi utama telah dikuasai dengan baik oleh penduduk setempat. Sistem ini terbukti mampu berreproduksi dalam jangka panjang, mendatangkan keuntungan ekonomi, dan memiliki landasan sosial yang kokoh.

Namun belakangan ini pohon damar dengan kualitas getah terbaik di dunia yang berasal dari Kabupaten Pesisir Barat, terus mengalami penyusutan. Seperti pernyataan yang diberikan kepala bidang kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Pesisir Barat bahwa, jumlah pohon damar di Kabupaten Pesisir Barat terus menyusut dari tahun ke tahun. Penyebabnya selain

roboh akibat cuaca ekstrem, juga karena pemilik *repong* damar menebang pohon untuk dimanfaatkan kayunya baik untuk dipakai sendiri atau dijual. Seperti yang tertera pada tabel dibawah, bahwa produksi damar terus saja menurun setiap tahunnya (lihat tabel 1). Tentu saja perihal seperti ini dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani damar dan kelestarian lingkungan jika tidak ditangani dengan serius.

**Tabel 1. Produksi getah damar di tahun 2004-2009**

No	Tahun (2004-2009)	Jumlah Produksi (ton)
1	2004	6.503
2	2005	3.992
3	2006	6.518
4	2007	6.250
5	2008	5.850
6	2009	2.469

Sumber:<http://cybex.pertanian.go.id> di akses pada 13 September 2015  
Pukul 16.13 WIB

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebelumnya terjadi penurunan jumlah produksi di tahun 2005, kemudian meningkat di tahun 2006 dan terjadi penurunan secara terus-menerus di tahun 2007-2009. Ada beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi damar yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, salah satunya semakin berkurangnya pohon damar akibat ditebangi oleh masyarakat untuk dijual kayunya. Padahal jika ini dapat dikelola dan tetap dilestarikan tentunya sudah sangat bisa untuk mensejahterakan masyarakat petani damar. Salah satu pusat damar di Kabupaten Pesisir Barat adalah di Pekon (*desa*) Pahlungan yang memiliki luas wilayah sekitar 2.500 hektar, masyarakat petani damarnya dapat memperoleh penghasilan rata-rata 3-4 juta rupiah setiap bulannya

per Kepala Keluarga (lihat tabel 2). Tentu saja jumlah ini dapat mencukupi kebutuhan hidup setiap keluarga petani damar.

**Tabel 2. Gambaran produksi repong damar**

No	Karakteristik	Desa pahmungan
1	Repong damar	2.500 hektar
	a. Produksi per bulan	200 kg / KK
	b. Harga jual	Rp. 15.000-20.000/kg
	c. Pendapatan	3-4 juta rupiah / KK

Sumber: <http://www.mongabay.co.id/2015/04/29/hutan-damar-di-akses-pada-25-Agustus-2015-Pukul-20.00-WIB>

Salah satu yang menyebabkan *repong* damar yang ada di Kabupaten Pesisir Barat terus menerus mengalami penurunan adalah maraknya aksi *illegal logging*, seperti pernyataan dari salah satu organisasi yang aktif dalam permasalahan lingkungan hidup yakni WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) yang terdapat dalam berita elektronik Teras Lampung, berikut isi berita yang dimuat dalam sebuah media lokal Lampung tersebut:

“*Repong* damar di Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya di Kecamatan Bengkuntat marak oleh aksi *illegal logging* pada 2008-2009 lalu. Ketika itu para aktivis lingkungan hidup sangat khawatir eksistensi *repong* damar yang sudah ratusan tahun menjadi ciri khas Pesisir Barat akan habis dalam tempo sepuluh tahunan lagi jika laju *illegal logging* tak bisa diatasi. Pada awal April 2009 salah satu organisasi lingkungan hidup yakni WALHI Lampung menemukan 100 m<sup>3</sup> kayu illegal di sepanjang bantaran Sungai Way Pintau. Pada awal Juni 2009 WALHI kembali menemukan 25 m<sup>3</sup> kayu hasil *illegal logging* di Kabupaten Pesisir Barat.”  
(<http://www.teraslampung.com> di akses pada 25 Agustus 2015 Pukul 20.45 WIB)

Seperti pernyataan yang diberikan kordinator Kawan Tani yakni Kurniadi, suatu kelompok *non governmental organization* (NGO) yang melakukan pendampingan petani *repong* damar bahwa masyarakat Krui di Kabupaten Pesisir Barat sudah mulai terbiasa menjual pohon damar. Pohon damar yang sudah dipotong-potong biasanya dimanfaatkan para pelaku *illegal logging* untuk mencampur kayu hasil

curian dari TNBBS. Kalau setiap hari pohon damar terus ditebangi dan dijual untuk dicampur kayu hasil *illegal logging*, maka lama-lama hutan damar akan musnah. Penebangan pohon damar yang terus berlanjut, tentu saja mengkhawatirkan. Sebab, ia bukan saja menghilangkan tradisi kearifan lokal, juga mengancam kelestarian lingkungan hidup. Selama ini *repong-repong* damar telah menjadi benteng bagi TNBBS. Warga tidak tertarik merambah kawasan karena mereka punya hutan sendiri. Ketika benteng ini jebol, maka kawasan konservasi yang menjadi warisan dunia itu akan terdesak. Warga yang tidak lagi punya kebun, pasti segera merangsek hutan dan melakukan kerusakan. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat wajib mencari jalan agar *repong* damar dapat diselamatkan. Damar merupakan ikon dan program unggulan Kabupaten Pesisir Barat, sudah seharusnya keberadaannya sebagai daerah hamparan *repong* damar yang sudah mendunia untuk terus dijaga dan dilestarikan, pemerintah daerah Pesisir Barat sendiri terus berupaya guna melestarikan *repong* damar.

Isu tentang keberlangsungan ketercukupan ekonomi dari para pelaku kegiatan konservasi sumberdaya alam semacam *repong* damar sangatlah rentan. Disinilah penting bagi pemerintah untuk memerankan fungsinya dalam membuat beragam kebijakan yang terkait dengan persoalan-persoalan kesejahteraan masyarakat petani damar dan kelestarian lingkungan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Bagaimanapun akhirnya, perjalanan inisiasi isu terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat petani damar dan pelestarian *repong* damar yang menjadi benteng bagi TNBBS hingga menjadi sebuah *agenda setting* kebijakan merupakan suatu hal yang penting untuk diteliti.

Proses inisiasi pelestarian *repong* damar dan kesejahteraan masyarakat petani damar yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat hingga masuk ke ranah kebijakan dapat dikatakan sebagai proses inisiasi kebijakan yang berjalan tanpa suatu hambatan berarti. Pro dan kontra tetap ada, namun tidak terlalu banyak menghalangi jalannya inisiasi kebijakan hingga menjadi *agenda setting* kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses dari mulai masalah muncul dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, hingga kemudian diinisiasi dan pada akhirnya ditetapkan menjadi agenda kebijakan yang akan disahkan oleh pemerintah.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana proses *agenda setting* terhadap isu pelestarian dan kesejahteraan masyarakat petani damar di Kabupaten Pesisir Barat ?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Memperoleh pengetahuan mengenai teori *agenda setting* mulai dari dinamika setiap peran aktor sampai penetapan masalah dalam proses *agenda setting* terhadap isu pelestarian dan kesejahteraan masyarakat petani damar di Kabupaten Pesisir Barat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pendalaman teori dan penambahan ilmu pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai *agenda setting* kebijakan publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi aparat pemerintah daerah yang menangani langsung masalah tentang perlindungan serta pelestarian *repong damar* di Kabupaten Pesisir Barat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

#### 1. Pengertian Kebijakan publik

Istilah kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan. Sedangkan menurut Dunn (2003:51) secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani. Akar kata *policy* dalam bahasa Yunani yaitu *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota), yang kemudian dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *politia* (negara) dan pada akhirnya berkembang menjadi *policie* di masa Inggris pertengahan yang mempunyai arti menanganai masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Anderson dalam Agustino (2014:7), memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Hal inilah yang membedakan

kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

## **2. Proses Kebijakan Publik**

Proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Walaupun rangkaian tahap ini tampak bersifat linier, dalam kenyataannya, tahap–tahap tersebut umumnya justru sebaliknya, yakni non–linier atau interatif. Para ahli kebijakan publik berbeda–beda dalam menamai atau mengelompokkan tahap–tahap tersebut. Anderson dalam Widodo (2013:16) membedakan ke dalam lima tahap yaitu : penentuan agenda (*Agenda setting*), perumusan alternatif kebijakan (*Policy formulation*), penetapan kebijakan (*Policy legitimation*), pelaksanaan atau implementasi kebijakan (*Policy implementation*), dan penilaian atau evaluasi kebijakan (*Policy evaluation*).

Menurut Thomas R. Dye dalam Widodo (2013:16) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut.

a. Identifikasi masalah kebijakan (*Identification of policy problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*Demands*) atas tindakan pemerintah.

b. Penyusunan agenda (*Agenda setting*)

Penyusunan agenda (*Agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

c. Perumusan kebijakan (*Policy formulation*)

Perumusan (*Formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

d. Pengesahan kebijakan (*Legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

e. Implementasi kebijakan (*Policy implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

f. Evaluasi kebijakan (*Policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsulat diluar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

## **B. Tinjauan Analisis Kebijakan Publik**

### **1. Definisi Analisis Kebijakan Publik**

Wildasky dalam Widodo (2013:19) mengemukakan bahwa "*Policy analysis is an activity creating problems that can be solved*". Bauer dalam Dunn (2003:1) juga mendefinisikan analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Sedangkan Leslie A. Pal dalam Widodo

(2013:20) menegaskan bahwa “*Policy analysis will be defined as the disciplined application of intellect to public problems.*”

Analisis kebijakan didefinisikan oleh Lasswell dalam Purwanto (2015:13) adalah sebagai aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Sedangkan Dunn dalam Purwanto (2015:13) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Menurut Widodo (2013:20), analisis kebijakan memiliki beberapa ciri yang meliputi:

- a. Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif, yakni aktivitas yang berkaitan dengan *learning and thinking*. Aktivitas tersebut hanya sebagai salah satu aspek dari proses kebijakan, artinya masalah kebijakan didefinisikan, ditetapkan, dipecahkan, dan ditinjau kembali. Proses tersebut akan melibatkan berbagai pihak, baik pihak yang setuju maupun yang tidak, baik mereka sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih. Selain itu, juga melibatkan kelompok kepentingan dan legislator, birokrat dan media masa. Elemen kognitif memiliki peran sentral dalam proses tersebut, sekalipun tidak dominan. Dikatakan memiliki peran sentral, karena menurut Leslie A. Pal

dalam Widodo (2013:20) bahwa proses kebijakan sesungguhnya, hanyalah merupakan proses diskusi dan debat ide-ide mereka tentang prioritas, masalah, dan solusinya. Aspek kognitif yakni memikirkan tentang posisi seseorang pada masalah kebijakan tertentu yang dilakukan oleh semua orang yang terlibat sejauh mereka dibutuhkan dalam klasifikasi atau justifikasi dan rasionalisasi pandangan atau pendapat mereka. Sungguhpun demikian, analisis kebijakan yang baik dan argumentasi kebijakan yang jelas dan meyakinkan tidak pernah dilakukan. Hal tersebut disebabkan jarang sekali bisa sampai pada kesimpulan, sekalipun hal tersebut menjadi lebih penting, karena proses kebijakan sebagai proses politik yang berusaha memadukan kekuasaan dan kepentingan.

- b. Analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif. Pada tataran analisis awal hanya bisa dilakukan secara individual. Namun demikian, analisis mereka lebih tepat dipahami sebagai kontribusi yang terorganisasi sekaligus sebagai pengetahuan kolektif terhadap masalah kebijakan tertentu. Hal ini menjadi semakin jelas, ketika seorang menteri meminta kepada penasihatnya untuk melakukan analisis dan melaporkan tentang suatu isu kebijakan. Laporan penasihatnya tadi tidak akan menjadi dasar keputusan mereka. Hal tersebut disebabkan karena masalah kebijakan publik sesungguhnya adalah publik itu sendiri. Mereka akan menghasilkan arus informasi hasil analisis dari berbagai sumber, seperti dari laporan surat kabar, representasi kelompok kepentingan, buku dan artikel ilmiah, komite palamentaria dan sebagainya. Jika demikian, ketika analisis dilakukan secara individual, pembuatan kebijakan biasanya dibuat

didasarkan pada pengetahuan kolektif dan terorganisasi terhadap masalah-masalah kebijakan. Setiap analis professional harus memahami fakta tersebut dan implikasinya.

- c. Analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan. Hal ini berarti masalah kebijakan yang harus dikaji melalui aktivitas dari sejumlah analisis. Aplikasi sederhana berkaitan dengan kebijaksanaan konvensional sekalipun dalam pengertian ini bukan sebagai disiplin. Hal tersebut hanya sebagai refleksi semata. Analisis bisa jadi sesuai dengan kebijaksanaan konvensional dan memanfaatkan sebagai aturan, tergantung kepada dukungannya, namun kita tidak dapat menerimanya begitu saja. Analisis kebijakan tidak akan pernah membuang semua asumsi dan beberapa latar yang diperlukan untuk tetap memperkuat hasil analisis. Namun demikian, analisis individual membutuhkannya bukan untuk memperlemah masalah tersebut dan apa yang telah tersedia menunjukkan bahwa analisis kebijakan sebagai pengetahuan yang terorganisasi. Asumsi-asumsi dan bias setiap studi tunggal akan diungkap dan diteliti secara cermat atau seksama oleh orang lain dalam proses kebijakan. Tanggung jawab setiap analis sekadar “memperjelas” dan merefleksikan diri sebaik mungkin untuk membantu meningkatkan kejelasan, namun tidak mengamati sampai pada sarannya.
- d. Analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik. Tidak semua masalah masuk ranah publik bahkan ketika masalah tersebut melibatkan sejumlah besar orang. Masalah publik memiliki dampak pada masyarakat atau beberapa orang yang berkepentingan sebagai anggota masyarakat. Oleh Karena itu, tidak mengherankan manakala memperdebatkan kebijakan yang

berkaitan dengan apakah masalah-masalah tersebut merupakan masalah publik dalam pengertian ini dan hal tersebut menjadi target dari aksi kebijakan. Tumbuhnya Negara pada abad sekarang ini bisa jadi dipandang sebagai bagian dari proses yang pada awalnya merupakan masalah pribadi. Sekalipun tidak berhubungan dengan isu atau kebijakan publik.

## **2. Proses Analisis Kebijakan Publik**

Dalam menganalisis sebuah kebijakan publik, sebenarnya cukup sulit dikarenakan dalam mencapai kesepakatan sebuah keputusan diperlukan masukan dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu permasalahan yang akan dirumuskan. Komunikasi yang dilakukan tidak cukup berhasil jika tidak adanya negosiasi, tarik ulur dari berbagai kepentingan didalamnya, belum lagi para pemilik kekuasaan yang mempunyai otoritas terbesar dalam suatu kebijakan. Maka diperlukan beberapa tahap untuk mengetahui proses suatu kebijakan bisa dirumuskan hingga mampu diimplementasikan di masyarakat.

Anderson dalam Purwanto (2015:18) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

### **a. Formulasi masalah (*Problem formulation*)**

Untuk dapat mengkaji suatu masalah publik diperlukan teori, informasi dan metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Sehingga identifikasi masalah akan tepat dan akurat, selanjutnya dikembangkan menjadi *policy question* yang diangkat dari *policy issues* tertentu.

b. Formulasi kebijakan (*Formulation*)

Dimana formulasi untuk mengembangkan alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah. Alternatif adalah sejumlah alat atau cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai, langsung ataupun tidak langsung sejumlah tujuan yang telah ditentukan. Alternatif-alternatif kebijakan dapat muncul dalam pikiran seseorang karena beberapa hal: (1) berdasarkan pengamatan terhadap kebijakan yang telah ada. (2) dengan melakukan semacam analogi dari suatu kebijakan dalam sesuatu bidang dan dicoba menerapkannya dalam bidang yang tengah dikaji. (3) merupakan hasil pengkajian dari persoalan tertentu.

c. Penentuan kebijakan (*Adoption*)

Alternatif-alternatif yang ada perlu dinilai berdasarkan kriteria sebagaimana yang dimaksud pada *point* sebelumnya diatas. Tujuan penilaian adalah mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan fisibilitas tiap alternatif dalam pencapaian tujuan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai alternatif mana yang paling layak, efektif dan efisien.

d. Implementasi (*Implementation*)

Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.

e. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi yang menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah. Mengetahui adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan.

## **C. Tinjauan tentang *Agenda setting* Kebijakan**

### **1. Isu kebijakan publik**

Suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Masalah–masalah yang muncul dalam masyarakat disebut juga isu atau masalah kebijakan. Anderson dalam Wahab (2012:96) menjelaskan bahwa masalah kebijakan yaitu suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat sehingga membutuhkan solusi yang segera. Sementara Salah satu fungsi pemerintah adalah membentuk kebijakan publik yang berisi pedoman–pedoman yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah–masalah masyarakat (Imawan dalam Kususmanegara, 2010:65).

Dunn dalam Wahab (2012:97) mengatakan bahwa isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan, baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Tidak semua isu yang pernah atau sedang berkembang di tengah–tengah masyarakat kemudian secara otomatis menjadi kebijakan publik. Peristiwa semacam ini sebenarnya bukanlah suatu fenomena yang aneh, karena bisa terjadi pada sistem politik mana pun, tak terkecuali di Indonesia. Di satu sisi, kita sering mendengar dan menyaksikan ada sejumlah isu tertentu dalam bidang tertentu yang dengan begitu mulus mendapatkan respon, masuk menjadi agenda kebijakan pemerintah. Namun di sisi lain, ada sejumlah isu tertentu, meskipun amat mendasar bahkan tidak pernah mampu melewati “rambu–rambu” birokrasi.

Kimber, 1974; Salesbury, 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986 dalam Wahab (2012;102) disebutkan bahwa secara teoritis, suatu isu akan cenderung memperoleh respon dari pembuat kebijakan, untuk dijadikan agenda kebijakan publik, kalau memenuhi beberapa kriteria tertentu. Diantara sejumlah kriteria itu yang penting adalah:

- a. Isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu, sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja; atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang jika tidak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih hebat di masa datang.
- b. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak yang bersifat dramatik.
- c. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak, dan mendapat dukungan berupa liputan media massa yang luas.
- d. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas
- e. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
- f. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang *fashionable*, dimana posisinya sulit untuk dijelaskan, tapi mudah dirasakan kehadirannya.

Meskipun kriteria di atas memiliki derajat kredibilitas dan makna ilmiah yang cukup tinggi, namun hendaknya jangan dijadikan sebagai rujukan pasti, melainkan hanya sekedar dijadikan sebagai semacam kerangka acuan. Sebab, banyak bukti yang menunjukkan bahwa meskipun beberapa persyaratan di atas relatif terpenuhi, dalam praktik kebijakan di Indonesia tidak jalan.

## 2. Pengertian *Agenda Setting*

Agenda kebijakan didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan politik secara umum serta dengan istilah “prioritas” yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dibandingkan dengan agenda yang lain. Cob dan Elder dalam Winarno (2012:83) mendefinisikan agenda kebijakan sebagai “*a set of political controversies that will be viewed as falling within range of legitimate concern meriting attention by a decision making body*”. Sementara itu, Barbara Nelson dalam Winarno (2012:83) menyatakan bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut. Dengan demikian, agenda kebijakan pada dasarnya merupakan pertarungan wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah.

Tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Isu-isu atau masalah-masalah tersebut harus berkompetisi antara satu dengan yang lain dan akhirnya hanya masalah-masalah tersebut harus berkompetisi antara satu dengan yang lain dan akhirnya hanya masalah-masalah tertentu saja yang akan menang dan masuk ke dalam agenda kebijakan. Dengan demikian, kita dapat mempertanyakan faktor-faktor apakah yang mendorong suatu masalah menjadi isu politik yang hidup, sedangkan masalah yang lain tidak.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:85), suatu isu akan mendapat perhatian bila memenuhi beberapa kriteria, yakni:

- a. Bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama ditinggalkan, misalnya kebakaran hutan.
- b. Suatu isu akan mendapatkan perhatian bila isu tersebut mempunyai sifat partikularitas, dimana isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar seperti kebocoran lapisan ozon dan pemanasan global.
- c. Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor *human interest*.
- d. Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi, dan masyarakat.
- e. Isu tersebut sedang menjadi *trend* atau sedang diminati oleh banyak orang.

Sedangkan Mark Rushefky dalam Winarno (2012:85) menyatakan bahwa suatu isu akan menjadi agenda melalui konjungsi tiga urutan.

- a. Pengidentifikasian, yakni tahap pengidentifikasian masalah yang didiskusikan sebelumnya.
- b. Menitikberatkan pada kebijakan atau pemecahan masalah. Urutan kedua ini biasanya terdiri dari para spesialis di bidang kebijakan, seperti misalnya para birokrat, staf legislatif, akademisi, para ahli dalam kelompok-kelompok kepentingan: dan proposal yang dibawa oleh komunitas-komunitas tersebut.
- c. Urutan ketiga merupakan urutan politik. Pada urutan ini biasanya disusun dari perubahan-perubahan dalam opini publik, hasil pemilihan umum, perubahan dalam administrasi dan pergantian partisipan atau ideologi dalam lembaga legislatif.

Kepemimpinan politik merupakan faktor penting dalam penyusunan agenda. Para pemimpin politik, apakah dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan keuntungan politik, kepentingan publik maupun kedua-duanya, mungkin menanggapi masalah-masalah tertentu, menyebarkan dan mengusulkan penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. Dalam kaitan ini, kepala eksekutif atau presiden maupun anggota-anggota lembaga legislatif mempunyai peran utama dalam politik dan pemerintahan untuk menyusun agenda publik.

Jika dalam melakukan pembahasan bagaimana suatu masalah sampai masuk ke agenda publik dengan menggunakan konsep agenda kebijakan, maka dalam membahas mengapa suatu masalah tidak mendapatkan perhatian para pembuat kebijakan sehingga tidak menjadi agenda publik, akan digunakan konsep tidak membuat keputusan. Menurut Peter Bachrach dan Morton Barzot dalam Winarno (2012:86), konsep tidak membuat keputusan merupakan sarana yang digunakan untuk mencegah atau menghilangkan tuntutan-tuntutan yang menghendaki perubahan dalam alokasi keuntungan-keuntungan dan hak-hak istimewa dalam masyarakat sebelum mendapatkan akses kedalam agenda sistemik atau pemerintah. Cara pertama adalah dengan menggunakan kekerasan dan cara kedua adalah dengan menggunakan nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang berlaku, yaitu dengan menggunakan budaya politik. Cara ketiga masalah krusial dalam politik adalah menyangkut pengelolaan konflik. Semua partai politik, pemimpin dan organisasi terlibat dalam pengelolaan konflik. Konflik ini bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan akibat yang destruktif.

Dalam upaya menjaga kelangsungan hidup, para pemimpin politik dan organisasi harus mencegah masalah-masalah atau isu-isu yang akan mengancam eksistensi mereka sebelum mencapai area politik, yaitu mencapai status agenda. Pendefinisian masalah yang dianggap mengancam eksistensi mereka tergantung pada macam pemimpin dan organisasi tersebut. Bagaimanapun juga para pemimpin politik dan organisasi akan menolak untuk mempertimbangkan beberapa masalah karena semua bentuk organisasi politik mempunyai kecenderungan untuk menyukai eksploitasi terhadap berbagai konflik dan menindas pihak lain karena organisasi adalah mobilisasi kecenderungan. Beberapa isu diorganisir dalam politik dan beberapa isu diorganisir diluar politik.

### **3. Tahap-Tahap *Agenda Setting* Kebijakan**

*Agenda setting* adalah tahap penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Proses ini akan menentukan apakah masalah akan dianggap sebagai masalah oleh pemerintah atau tidak. Proses penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson dalam Widodo (2013:53) secara runtut terdiri atas :

#### *a. Private problems*

Penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah yang muncul di masyarakat. Masalah ini dapat diungkapkan oleh seseorang sebagai masalah pribadi. Masalah pribadi merupakan masalah-masalah yang mempunyai akibat terbatas atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat langsung. Kemudian berkembang lebih lanjut menjadi masalah publik.

b. *Public problems*

Masalah publik diartikan sebagai masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang terlibat secara tidak langsung. Masalah publik tersebut kemungkinan akan berkembang menjadi isu kebijakan (*Policy issues*).

c. *Isu*

Isu adalah problema publik yang saling bertentangan satu sama lain (*Controversial public problems*). Isu dapat diartikan juga sebagai perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat tentang persepsi dan solusi (*Policy action*) terhadap suatu masalah publik. Isu kebijakan tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan yang aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan begitu, isu kebijakan merupakan hasil perdebatan tentang definisi, klasifikasi, eksplanasi dan evaluasi masalah. Isu kebijakan tadi kemudian mengalir dan masuk dalam agenda pemerintah.

d. Agenda pemerintah

Agenda pemerintah merupakan sejumlah daftar masalah di mana para pejabat publik menaruh perhatian yang serius pada waktu tertentu. Agenda pemerintah menurut Cobb dan Elder dalam Widodo (2013:54) dibedakan menjadi 2 macam; (a) *Systemic agenda*, agenda sistemik merupakan semua isu yang pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut memang berada dalam yurisdiksi kewenangan pemerintah; (b) *Institutional agenda*, sementara agenda institusional merupakan serangkaian masalah yang secara tegas membutuhkan

pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritas.

Masalah yang muncul kemudian adalah peran apa yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam proses *agenda setting* ini. John dalam Widodo (2013:63) menggambarkan bahwa terdapat tiga pilihan utama peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam proses *agenda setting*. Ketiga pilihan ini, oleh Ripley dalam Widodo (2013:63) ditambah satu peran lagi sehingga terdapat empat macam pilihan utama peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam proses *agenda setting*. Keempat peranan tadi adalah sebagai berikut :

1. *Let It Happen*

Pilihan ini sangat beragam, dimana para pejabat pemerintah memainkan peran relatif pasif dalam penyusunan agenda. Pemerintah hanya menjaga *channels of access and communication* sehingga mereka yang terpengaruh dapat didengar dan pemerintah tidak sampai membantu individu atau kelompok dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan atau menerima tugas untuk mendefinisikan dan memprioritaskan masalah-masalah yang ada.

2. *Encourage It to Happen*

Pada pilihan kedua ini, para pejabat pemerintah sampai pada membantu orang-orang dalam mendefinisikan dan mengartikulasikan masalah-masalah mereka.

3. *Make It Happen*

Pada pilihan ini, pejabat pemerintah memainkan peranan aktif dalam mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan-tujuan. Para pembuat kebijakan tidak sampai menunggu suatu sistem bekerja, tetapi mereka (*Policy maker*) mengarahkan beroprasinya sistem tersebut dengan menetapkan

mekanisme pendefinisian dan menetapkan prioritas masalah dalam pemerintahan.

#### 4. *Don't Let It Happen*

Pada pilihan ini, pejabat pemerintah tidak hanya tidak membantu mendefinisikan dan mengartikulasikan masalah, akan tetapi berusaha secara nyata untuk melarang atau menutup “*cannel of access and communication*”, karena mereka tidak ingin masalah tersebut masuk dalam agenda pemerintah. Dalam proses penyusunan agenda (*agenda setting*) peran tersebut perlu dimainkan oleh para pejabat pemerintah, untuk menjaga dan mencegah jangan sampai *policy issues* yang tidak dikehendaki bisa masuk dalam agenda pemerintah. Proses penyusunan agenda ini tidak dihadapkan pada suatu hambatan yang berarti, hendaknya *policy issues* yang dipilih benar-benar penting dan mempunyai dampak besar bagi banyak orang. selain itu, isu kebijakan ini memang telah menjadi perhatian para pembuat kebijakan, serta sesuai dengan *platform* politik dan kemungkinan besar isu kebijakan ini dapat dipecahkan. Apabila hal ini telah diperhatikan dan dipenuhi. Proses penyusunan agenda tidak saja lancar atau ditemukan hambatan yang cukup berarti, tetapi juga akan memberikan corak dan warna pada proses selanjutnya, serta hasil kebijakan yang dipilih akan benar-benar dapat memecahkan masalah yang tumbuh kembang di masyarakat. Disinilah makna arti penting dari penyusunan agenda dalam proses selanjutnya.

#### 4. Aktor-Aktor Dalam *Agenda Setting*

Dalam perspektif ilmu politik, analisis terhadap proses kebijakan harus terfokus pada aktor-aktor. Jika politik diartikan sebagai “siapa, melakukan apa, untuk memperoleh apa”, maka aktivitas yang terjadi dalam proses kebijakan adalah satu bentuk kegiatan yang dilakukan aktor politik untuk memperoleh nilai-nilai politik. Peran aktor-aktor sangat menentukan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mempertimbangkan konsistensi kebijakan yang dibuatnya.

Para pemain kebijakan yang terlibat dalam perumusan kebijakan berbeda antara Negara maju dan berkembang. Di negara-negara berkembang, seperti Kuba, Korea Selatan dan Indonesia, perumusan kebijakan lebih dikendalikan oleh elit politik dengan pengaruh massa rakyat relatif kecil. Struktur pembuatan kebijakan Negara-negara berkembang cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan Negara-Negara maju.

Menurut Anderson dalam Winarno (2012;126) mengatakan bahwa aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi (*official actors*) dan para pemeran serta tidak resmi (*unofficial actors*).

##### a. *Official actors*

Aktor yg terlibat karena diberi tanggungjawab oleh undang-undang dan atau peraturan lainnya, sehingga mereka mempunyai legalitas untuk membuat dan memaksakan pelaksanaan suatu kebijakan. *Official actors* terdiri dari :

1) Lembaga Legislatif

Berperan diantaranya membantu masyarakat (konstituen) untuk memecahkan masalahnya yang terkait dengan pelayanan pemerintah (*Casewor*), dan kegiatan mengawasi implementasi kebijakan. Mereka berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Hal ini tidak berarti bahwa hanya karena legislatif ditunjuk secara formal, maka mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas.

2) Lembaga Eksekutif

Terdiri dari : Presiden, staff langsung presiden, dan aktor-aktor lain yang diangkat oleh presiden Dalam formulasi kebijakan, presiden mempunyai hak veto untuk membatalkan atau menolak usulan dari legislatif.

3) Lembaga Yudikatif

Lembaga peradilan yang melakukan pengawasan terhadap legislatif dan eksekutif. Perannya melakukan *judicial review*.

b. *Unofficial actors*

Aktor yang terlibat dalam proses kebijakan namun tidak secara eksplisit memiliki kewenangan legal untuk ikut berpartisipasi. Kelompok ini terlibat karena mereka memiliki hak untuk terlibat. Selain itu *interest group* adalah cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi agar diakomodir dalam bentuk kebijakan publik. *Unofficial actors* meliputi:

1) *Individual citizens*

Dalam pembahasan mengenai pembuatan kebijakan, warganegara secara individu sering diabaikan. Kelompok kepentingan dan bahkan kelompok

penekan justru lebih terkemuka. Hal ini kurang baik karena menyisakan perbedaan-perbedaan dalam mekanismenya. Meskipun tugas untuk membuat kebijakan biasanya diberikan pada pejabat publik, namun dalam beberapa kejadian sejatinya warganegara sebagai individu masih mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan keputusan.

2) *Interest group*

Kelompok kepentingan muncul untuk memainkan tugas yang penting dalam pembuatan kebijakan di hampir semua Negara. di Negara maju atau Negara berkembang, yang dapat dibedakan pada bagaimana kelompok kepentingan diatur oleh undang-undang dan bagaimana keabsahannya. Kelompok kepentingan semakin banyak bermunculan dan bertindak semakin terbuka serta bebas. Hampir disemua sistem politik di dunia kelompok kepentingan mempunyai fungsi mempertemukan kepentingan “warga tertentu” yang tidak hanya mengemukakan tuntutan dan dukungan mereka tetapi juga memberikan alternatif bagi tindakan kebijakan.

3) *Political parties*

Berperan penting dalam menggalang opini publik yang bermanfaat dalam melontarkan isu-isu yang nantinya dikembangkan dalam tahap *agenda setting*. Partai politik juga menjalankan fungsi-fungsi politik yang penting dalam proses kebijakan.

4) Think tanks dan lembaga-lembaga riset

Kemunculan think tanks dan lembaga riset yang bertujuan untuk memengaruhi agenda kebijakan melalui publikasi riset dan advokasi

kebijakan. Think tanks nonpemerintah menganggap diri mereka berperan dalam membentuk konteks untuk debat isu dan kebijakan, dan bertujuan untuk memengaruhi proses isu menjadi “*problem*”.

#### 5) Media komunikasi

Merupakan aktor yang terlibat dalam semua tahap kebijakan karena berfungsi sebagai komunikator antara pemerintah dan masyarakat. Media komunikasi mempunyai kekuatan yang khas, yaitu kemampuannya menjangkau *audiens* lebih luas dibandingkan kelompok manapun. Kekhasan itu menjadikan media komunikasi merupakan agen yang efektif dalam membentuk opini publik. Selain itu, media komunikasi juga berperan dalam agenda kebijakan.

### **5. Nilai-Nilai Yang Berpengaruh Dalam Agenda Setting**

Islami dalam Kusumanegara (2010:60) menyatakan bahwa keterlibatan aktor dalam proses kebijakan tidaklah bebas nilai atau bebas dari kepentingan. Nilai adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Para aktor baik yang berasal dari kalangan pemerintah maupun nonpemerintah terlibat dengan persoalan nilai dalam proses kebijakan.

Anderson dalam Kusumanegara (2010:61) menggolongkan nilai-nilai ke dalam lima kelompok, yaitu: nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai kebijakan, dan nilai-nilai ideologi.

- a. Nilai-nilai politik menunjuk pada kepentingan-kepentingan kelompok politik tertentu. Dalam hal ini, para aktor yang berasal dari kalangan partai, misalnya, dapat membuat kebijakan yang hanya memberikan keuntungan pada partainya

sendiri. Dengan demikian, para analis kebijakan sangat disarankan untuk mengobservasi isi kebijakan dikaitkan dengan kelompok politik yang terlibat dalam proses kebijakan. Biasanya kebijakan-kebijakan dalam bidang politik, misalnya undang-undang partai politik dan pemilu, sarat dengan muatan nilai politik. Partai politik atau gabungan partai yang dominan dalam parlemen mungkin akan mengembangkan isu tentang persyaratan calon presiden ditetapkan tidak terlalu ketat untuk memuluskan jalan kandidat presiden dari partainya.

- b. Nilai organisasi seringkali mempengaruhi birokrat ketika terlibat dalam berbagai tahapan kebijakan. Sesuai dengan hirarki yang ada dalam birokrasi, para aktor di posisi lebih tinggi biasanya menekankan nilai-nilai seperti: efisiensi, efektivitas, imbalan, sanksi, serta hak-hak istimewa mereka, kepada aparat yang menduduki posisi dibawahnya nilai-nilai lainnya misalnya nilai untuk mempertahankan agar organisasinya agar tetap hidup dan selalu berkembang. Dalam hal ini seorang pemimpin menekankan perlunya nilai loyalitas para bawahan yang terlibat dalam proses kebijakan. Di Indonesia pada masa orde baru pernah ada penekanan mono loyalitas di kalangan birokrasi yang ditunjukkan untuk memantapkan peran birokrasi dalam proses politik. Pemahaman nilai-nilai politik maupun organisasi bisa diperoleh analis ketika memperhatikan statemen politik maupun interpretasi atas isi kebijakan. Demikian pula halnya dengan nilai-nilai pribadi aktor, disadari atau tidak, bisa nampak dalam statemen-statemen yang dinyatakannya.
- c. Nilai-nilai pribadi biasanya menyangkut kepentingan ekonomi si aktor atau reputasi pribadi dan kekuasaannya. Misalnya dalam melakukan aktivitas

kebijakan di pemerintahan yang kolusif, seorang aktor “penting” menyatakan perlunya menata kota dengan membangun perumahan-perumahan mewah. Pernyataan tersebut mungkin mencerminkan kepentingan ekonomi si aktor yang bisa diperoleh melalui “kliennya” yang berperan sebagai pengusaha *real estate*. Upaya memenuhi nilai pribadi boleh jadi “menutup mata” aktor terhadap konskuensi kebijakan di masa depan. Misalnya konskuensi rusaknya lingkungan hidup akibat tata perumahan yang tidak ramah lingkungan.

- d. Disamping ketiga nilai diatas, ada nilai kebijakan yang menunjukkan pada nilai-nilai yang menjadi pertimbangan aktor memang benar-benar ditujukan demi kebaikan kebijakan yang akan diputuskan. Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010:62) menyatakan bahwa kebijakan publik bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik. Aktor mungkin akan mendasarkan aktivitasnya pada nilai-nilai yang menurut pendapatnya dapat menyelesaikan persoalan publik tersebut, misalnya nilai-nilai pemberantasan korupsi, persamaan warga Negara di depan hukum, hak-hak azasi manusia, dan sebagainya. Nilai-nilai kebijakan dianggap moralis dan idealis, karena si aktor bisa memperoleh resiko yang tidak menguntungkan dirinya.
- e. Berikutnya, nilai ideologi merupakan nilai yang dipertimbangkan dalam proses kebijakan. Ideologi merupakan sistem keyakinan yang berfungsi sebagai pedoman tingkah laku masyarakat serta cara pandang masyarakat terhadap dunianya. Misalnya, di Indonesia dikenal pancasila sebagai ideologi negara. Ada pula ideologi lainnya yang dikenal di Indonesia, yakni: nasionalisme (moderat maupun radikal), islam, komunisme, sosialisme

demokratis, dan tradisionalisme Jawa. Nilai ideologi dapat tercermin dalam aspek normatif / isi kebijakan maupun aksi kebijakan.

Berdasarkan pada penggolongan Anderson, bisa diketahui bahwa nilai-nilai para aktor dalam proses kebijakan tidak sepenuhnya didasarkan pada kepentingan publik. Hal ini bertentangan dengan aspek normatif tentang kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik dalam berbagai bentuk dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kepentingan publik yang harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Namun ada pula nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik, dengan demikian berpihak pada kepentingan publik.

#### **D. Tinjauan Terhadap *Repong Damar***

*Repong damar* bukan hutan alami, melainkan kebun budidaya yang merupakan sumbangan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat kepada seluruh masyarakat daerah tropika. *Repong damar* tersebar merata hampir di seluruh Kabupaten Pesisir Barat. Data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mencatat luas *repong damar* di Kabupaten Pesisir Barat sekitar 29.000 ha. Menurut sejarahnya, pohon damar mata kucing berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Selatan (daerah Martapura).

Pada jaman Belanda, masyarakat Krui telah melakukan kegiatan perdagangan hasil hutan seperti buah-buahan, gading, rotan serta getah damar mata kucing. Damar mata kucing merupakan komoditas yang paling banyak diminta pasar.

Oleh karenanya kegiatan budidaya pohon damar mulai dikembangkan. Desa Pahlungan yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Pesisir Barat, terletak di dekat pesisir pantai barat Provinsi Lampung (berjarak  $\pm$  12 km dari pesisir pantai) merupakan daerah yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung (jaman Belanda disebut BW = *Bosch Weissen*) yang kemudian ditetapkan pemerintah menjadi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Menurut penuturan tokoh-tokoh masyarakat, sistem tata ruang wilayah yang dianut oleh masyarakat pesisir Krui Lampung diawali sejak pengaturan lahan di zaman Belanda. Terdapat 3 wilayah pengelolaan lahan, yaitu :

- 1) Pemukiman dan sawah (yang terletak diantara 1- 2 km dari garis pantai).  
Lahan pemukiman dan sawah diperuntukan bagi tempat tinggal warga Krui dan bercocok tanam padi.
- 2) Tanah marga / *repong damar* (yang terletak antara 2 – 12 km dari garis pantai). Lahan marga merupakan lahan hutan yang dibuka oleh petani untuk perladangan dan secara bertahap bersuksesi menjadi *repong damar*.
- 3) Lahan BW (= *Bosch Weissen*) (terletak setelah 12 km dari garis pantai) ditetapkan sebagai hutan lindung untuk fungsi resapan air. *Bosch Weissen* yang sejak dulu merupakan hutan primer yang tidak dibuka, hingga saat ini dikenal sebagai kawasan Taman Nasional Bukit Barisan. Pada tahun 1993, pemerintah Indonesia membuat kebijakan baru dengan merubah letak tata batas. Sebagian lahan marga yang berdekatan dengan lokasi BW yaitu 10-12 km dari garis pantai) ditetapkan sebagai kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT). Dengan demikian susunan penataan wilayah menjadi 4 kelompok, yaitu:

- a. Pemukiman dan sawah (terletak diantara 1-2 km dari garis pantai).
- b. Tanah marga/*repong* damar (terletak antara 2–0 km dari garis pantai).
- c. Hutan Produksi Terbatas (terletak antara 10 – 12 km dari garis pantai).
- d. Lahan BW (= Bosch Weisen) atau kawasan TNBBS

### **E. Kerangka Pikir**

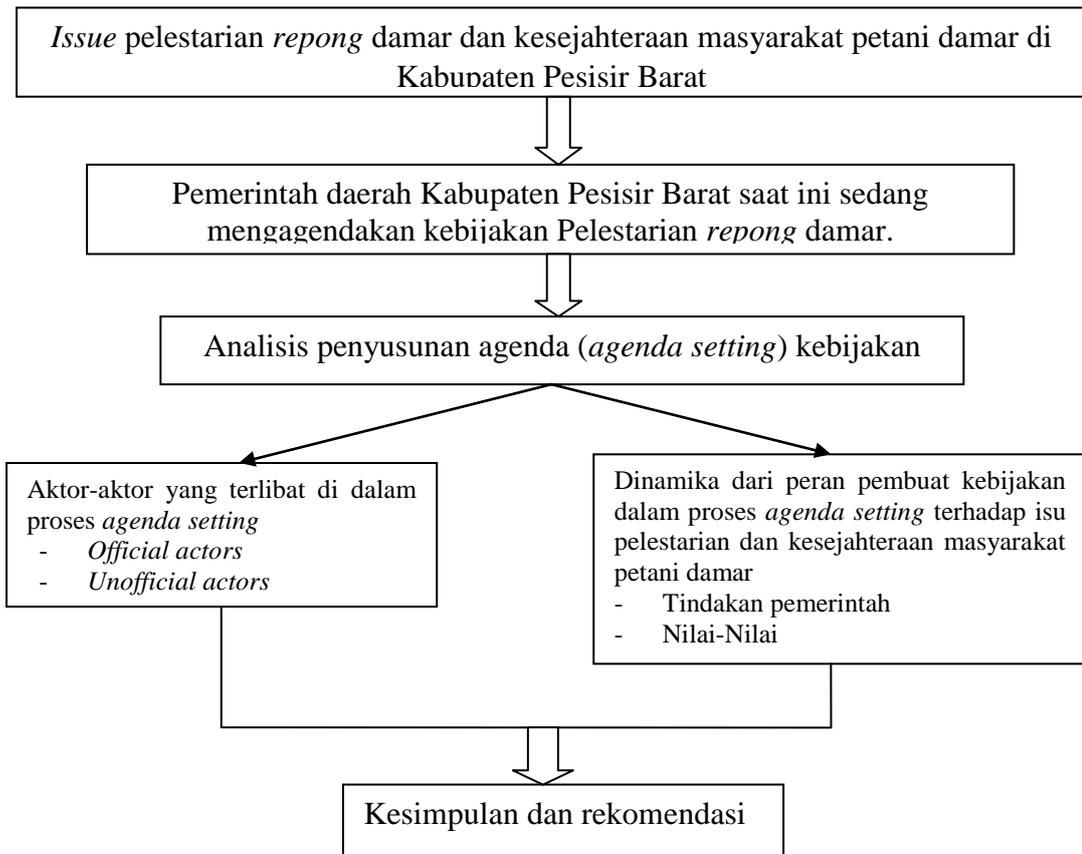
Kabupaten Pesisir Barat merupakan satu-satunya kabupaten di provinsi Lampung yang memiliki kekayaan alam berupa getah damar mata kucing. Getah yang berasal dari *repong* damar ini sejak dahulu sudah dikenal sampai ke eropa. Namun, *repong* damar saat ini semakin lama semakin berkurang akibat penebangan yang terus dilakukan masyarakat sebagai tuntutan ekonomi, ini dikarenakan pohon damar merupakan jenis tanaman kayu yang dapat ditebang untuk dijual kayunya. Sehingga jika ini dibiarkan terus menerus pemerintah khawatir *repong-repong* damar yang ada di Kabupaten Pesisir Barat akan punah. Dalam upaya mengembalikan kejayaan getah damar mata kucing yang semakin lama semakin hilang akibat penebangan terhadap pohon damar di Kabupaten Pesisir Barat, maka diperlukan upaya yang dituangkan dalam bentuk kebijakan untuk melestarikan *repong* damar yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat saat ini sedang mengagendakan isu masalah kesejahteraan masyarakat petani damar dan pelestarian *repong* damar kedalam sebuah agenda kebijakan.

Melalui Proses penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson dalam Widodo (2013:53-55) tahapan *agenda setting* secara runtut terdiri atas :

- a. *private problems*,
- b. *public problems*,
- c. *issues*,
- d. *systemic agenda*,
- e. *Institutional agenda*.

Dalam studi proses kebijakan, aktor-aktor kebijakan berasal dari berbagai macam lembaga yang tercakup dalam dua kategori, yaitu *official actors* dan *unofficial actors*. Para ahli mengidentifikasi aktor-aktor dengan berbagai macam sebutan, yaitu: legislator, Eksekutif, Lembaga peradilan, kelompok penekan, Partai Politik, Mediaa Massa, Organisasi komunitas, Aparat administrasi atau birokrasi, kelompok *Non Governmental Organization (NGO)*, kelompok swasta, kelompok *think tanks*, dan kabinet bayangan (Anderson, 1979;Ripley,1985;Guy Peter dalam Kusumanegara,2010:53).

Dengan menggunakan teori *agenda setting*, isu masalah pelestarian *repong* damar dan kesejahteraan masyarakat petani damar sampai menjadi masalah publik dianalisis dengan melihat aktor-aktor mana saja yang dominan mendorong isu tersebut kedalam *agenda setting* kebijakan. Kemudian Dinamika dari peran pembuat kebijakan dalam proses *agenda setting* terhadap isu pelestarian dan kesejahteraan masyarakat petani damar yakni, tindakan atau hubungan antar aktor dan nilai-nilai yang terjadi dalam proses agenda kebijakan pelestarian *repong* damar di Kabupaten Pesisir Barat yang kemudian menghasilkan keputusan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Sehingga masalah pelestarian *repong* damar dapat dibentuk formulanya. Secara skematis pada kerangka pemikiran berikut ini.

**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**

Sumber: Diolah Peneliti, 2015

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses *agenda setting* dalam tahap penyusunan kebijakan pelestarian *repong* damar di Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertipe deskriptif yakni jenis tipe yang berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Hal tersebut didasarkan karena penelitian ini menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis dari data-data yang diperoleh dari sumber penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara umum yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi harus dipandang sebagai bagian dari keutuhan.

Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2005:5) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Seiring dari uraian di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian dalam ilmu pengetahuan sosial. Penelitian dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dimana antar individu (peneliti) dengan latar (fokus penelitiannya) tidak diisolasi ke dalam bentuk variabel atau hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat penelitiannya merupakan satu kesatuan yang utuh (holistik). Peneliti juga merupakan instrumen kunci dalam penelitian ini, karena penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam suatu kawasan tertentu. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif penulis bermaksud untuk memaparkan mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu menganalisis dan mendeskripsikan perumusan tentang *agenda setting* kebijakan pelestarian *repong* damar di Kabupaten Pesisir Barat.

## **B. Fokus Penelitian**

Suatu penelitian perlu adanya pembatasan masalah yang diangkat. Selain itu, perlu juga menyatakan secara khusus batas-batas masalah agar penelitian lebih terarah dan dapat memperoleh gambaran yang jelas kapan penelitian tersebut dianggap telah selesai. Menurut Moleong (2005:97), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna untuk memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan. Hal yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif adalah masalah dan fokus penelitian, karena fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan

dalam pengumpulan data sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada proses *agenda setting* mengenai isu kesejahteraan masyarakat petani damar dan tentang Pelestarian *repong* damar untuk masuk kedalam agenda kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Aktor-aktor yang terlibat di dalam proses *agenda setting*
  - a. *Official actors*
  - b. *Unofficial actors*
2. Dinamika dari peran pembuat kebijakan dalam proses *agenda setting* terhadap isu pelestarian dan kesejahteraan masyarakat petani damar
  - a. Tindakan pemerintah
  - b. Nilai-Nilai

Dengan menggunakan teori *agenda setting* menurut Anderson, isu kesejahteraan masyarakat petani damar dan pelestarian *repong* damar menjadi sebuah masalah publik dengan keterlibatan aktor-aktor mana saja dengan peranannya masing-masing yang dominan mendorong isu tersebut dan keputusan apa yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*). Menurut Moleong (2005:86), dalam penentuan lokasi penelitian cara yang terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dalam menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Lokasi penelitian dalam hal ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Alasannya Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang memiliki kekayaan alam berupa getah damar terbaik di dunia, selain itu juga pohon damar merupakan salah satu ikon di wilayah termuda provinsi lampung tersebut.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Moleong (2005:83), bahwa data merupakan segala keterangan dan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari apa yang diamati, didengar, dirasa dan dipikirkan oleh peneliti.

##### **1. Jenis Data**

###### **a) Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang diperlukan peneliti. Data utama dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai hasil pengumpulan yang dilakukan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian.

###### **b) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang didapat. Data sekunder bukan data yang didapat langsung oleh peneliti, melainkan telah melalui tangan kedua dan seterusnya. Data sekunder dapat berupa data-data tertulis seperti monografi, laporan

kegiatan, notulensi rapat, dokumen resmi, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data dari Kantor Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, serta data pendukung dari internet, buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisa data. Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

### a) Informan

Merupakan sumber data primer, meliputi kata-kata maupun tindakan dari orang-orang yang terlibat selama proses pembuatan kebijakan. informan dalam penelitian ini melibatkan orang-orang dari Kantor Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Barat, PMPRD (Persatuan Masyarakat Petani Repong Damar) Kabupaten Pesisir Barat.

### b) Dokumen

Berbagai dokumen yang terkait dengan proses *agenda setting* kebijakan pelestarian *repong* damar Kabupaten Pesisir Barat juga bisa dijadikan sebagai sumber data. Baik itu , data statistik maupun foto-foto akan dijadikan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung dan memperkuat data primer.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a) Wawancara (*interview*)

Budi dan Basrowi (2006:158) mendefinisikan wawancara sebagai dialog atau tanya jawab antara *interview* dan *interviewer* dengan tujuan memperoleh jawaban-jawaban yang dikehendaki. Moleong (2005) mendefinisikan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengambilan data. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara harus menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis. Wawancara dilakukan kepada narasumber dari masing-masing instansi terkait, dengan tema atau topik mengenai kebijakan pelestarian *repong* damar.

### b) Observasi

Adapun data diperoleh melalui hasil observasi visual, yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses sebuah kebijakan sampai pada *agenda setting*. Budi dan Basrowi (2006:144) mendefinisikan bahwa observasi merupakan cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

c) Dokumentasi

Pengambilan data yang diperoleh berdasarkan informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung keterangan maupun fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian. Menurut Budi dan Basrowi (2006:142) dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan hasil perkiraan. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data seperti dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:246) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1) *Data Reduction* atau reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2) *Data Display* atau penyajian data

Dengan *Data Display* maka peneliti dapat dengan mudah memahami data yang telah diperoleh selama penelitian. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian atau teks yang bersifat naratif, bagan dan dalam bentuk tabel.

3) *Conclusion/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Dalam Penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan maka data tersebut dapat dikatakan sebagai data yang kredibel.

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Kabupaten Pesisir Barat**

Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui adalah salah satu dari Lima belas Kabupaten atau Kota di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012.

Secara administratif wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas  $\pm 2.907,23$  Km<sup>2</sup> atau 8,39% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, dengan jumlah penduduk sebesar  $\pm 136.370$  jiwa pada tahun 2011 dan 117 Desa/Kelurahan. Kabupaten Pesisir Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 Kelurahan. Dilihat dari luas wilayah kecamatan Bengkunt Belimbing merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Pesisir Barat dengan luas wilayah 97.122 ha atau 32,69% dari luas total Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan untuk luas wilayah kecamatan terkecil adalah kecamatan Krui Selatan dengan luas wilayah 3.625 Ha atau 1,26% dari luas total wilayah

Kabupaten Pesisir Barat. Untuk mengetahui kecamatan-kecamatan dan jumlah kelurahan atau pekon yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dapat di lihat pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3. Nama, luas wilayah dan jumlah pekon per-Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/desa		Luas wilayah Administrasi	
		Kelurahan	Desa/pekon	(Ha)	%thd total
1	Bengkunat Belimbing	-	14	97.122	32,69
2	Bengkunat	-	9	21.503	7,45
3	Ngambur	-	9	24.056	11,33
4	Pesisir Selatan	-	15	40.917	14,17
5	Krui Selatan	-	10	3.625	1,26
6	Pesisir Tengah	2	6	120.580	4,18
7	Way Krui	-	10	4.283	1,42
8	Karya Penggawa	-	12	9.566	7,31
9	Pesisir Utara	-	12	11.212	2,92
10	Lemong	-	13	39.435	15,76
11	Pulau Pisang	-	6	252.00	1,51
<b>Luas Kab.Pesisir Barat</b>		<b>2</b>	<b>116</b>		

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Barat 2015

Menurut Oldeman, Irsal L Darwis (1979), akibat pengaruh dari rantai pegunungan Bukit Barisan, maka Pesisir Barat memiliki 2 (dua) zone iklim yaitu: (1) Tipe iklim A, yang memiliki 8 Bulan basah, dimana meliputi bagian Barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. (2) Tipe iklim B, dengan jumlah Bulan basah 7-9 Bulan, yang terdapat dibagian Timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Secara umum curah hujan di daerah ini berkisar antara 2500-3000 mm/tahun. Tingkat kelembaban berkisar antara 50-80%, yang dikendalikan oleh regim sirhu dari panas (*isohypothermic*) pada dataran pantai di bagian Barat sampai dingin (*iosthermic*) diwilayah perbukitan.

Secara Topografi Kabupaten Pesisir Barat dibagi menjadi 3 (tiga) unit topografi yakni: (1) Daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 m dari permukaan laut). (2) Daerah berbukit (ketinggian 600 sampai 1.000 m dari permukaan laut). (3) Daerah pegunungan (Daerah ketinggian 1.000 sampai dengan 2.000 meter dari permukaan laut). Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat umumnya datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Di bagian Barat Laut Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit, yaitu Gunung Pugung (1.964 m), Gunung Sebayon (1.744 m), Gunung Telalawan (1.753 m) dan Gunung Tampak Tunggak (1.744 m).

## **B. Gambaran Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

### **1. Visi dan Misi**

Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat adalah “Hutan Lestari dan Perkebunan Berkelanjutan, untuk Terwujudnya Rakyat yang Sejahtera”. Sedangkan misi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat:

- a) Meningkatkan penguatan kelembagaan masyarakat pengelola hutan baik HTR atau HKM
- b) Mewujudkan hasil hutan non kayu unggulan Kabupaten
- c) Menghilangkan kebakaran hutan dan illegal logging
- d) Tumbuhnya industri ramah lingkungan hasil hutan kayu maupun non kayu hulu dan hilir
- e) Kabupaten Pesisir Barat mampu menjaga dan mewujudkan keutuhan situs warisan dunia

f) Menjamin ketersediaan sumber air.

## **2. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Pesisir Barat No 37 tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Pesisir Barat, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Perencanaan; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang pengusahaan hutan, membawahi :

- 1) Seksi Pemanfaatan Aneka Usaha Hasil Hutan;
- 2) Seksi Peredaran Hasil Hutan; dan
- 3) Seksi Perizinan dan Kemitrausahaan Hasil Hutan.

d. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan

- 1) Seksi Pengawasan dan Pengamanan Tanaman Hutan;
- 2) Seksi Penyelesaian Konflik dan Penyidikan; dan
- 3) Seksi Rehabilitasi, Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

e. Bidang Pekebunan, membawahi :

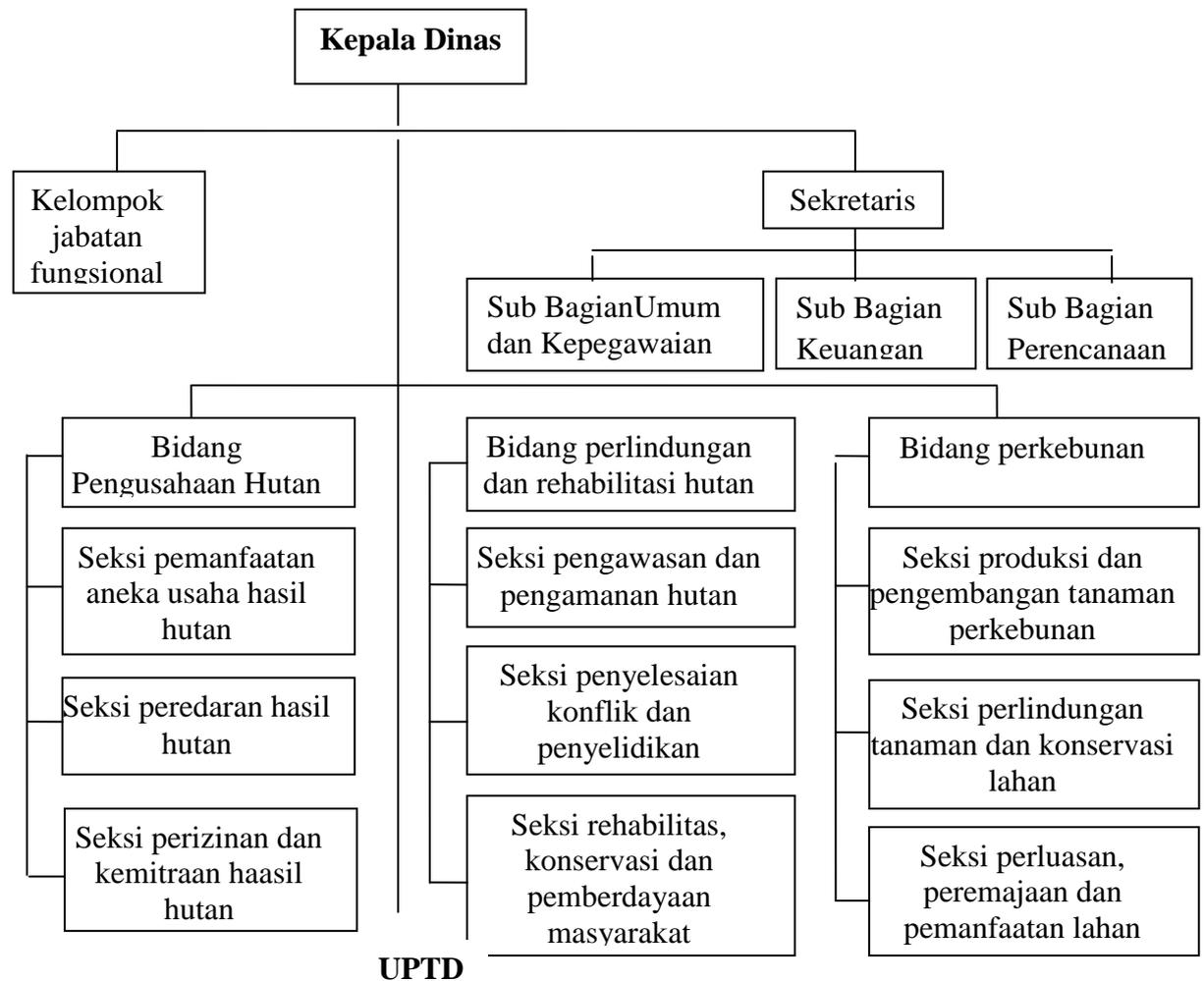
- 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan;
- 2) Seksi Perlindungan Tanaman dan konservasi lahan; dan
- 3) Seksi Perluasan Peremajaan dan Pemanfaatan Lahan.

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) yang terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; dan
- 3) Kelompok jabatan fungsional.

Secara sederhana susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat dapat digambarkan kedalam bagan berikut:

**Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat**



Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Pesisir Barat Tahun 2015

### **C. Gambaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat**

Undang-undang Nomor 22/2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengemukakan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam UU NO 32/2003 disebutkan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pesisir barat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki dan melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sesuai dengan tata tertib DPRD kabupaten pesisir barat Nomor 17 tahun 2014.

Visi DPRD kabupaten Pesisir Barat masa bukti 2014-2019 adalah : “Mewujudkan masyarakat kabupaten pesisir barat yang bertaqwa ,berdaya, berbudaya menuju sejahtera,melalui penguatan peran DPRD kabupaten pesisir barat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan daerah yang berpiak kepada rakyat”. Penjelasan lebih detail visi tersebut uraikan dalam misi DPRD kabupaten pesisir barat sebagai berikut :

1. Menghasilkan produk-produk kebijakan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Meningkatkan profesionalisme anggota DPRD sebagai refresentasi rakyat kabupaten pesisir barat mengevaluasi dan mendorong perbaikan regulasi perizinan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten pesisir barat untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan ekonomi sosial dan budaya yang mungkin timbul.

3. Mendorong terwujudnya hubungan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat politik/ekonomi/sipil dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
4. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja lembaga DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat,
5. Mendorong terwujudnya lembaga legislatif yang bersih dan berwibawa dalam akuntabilitas dan transparansi lembaga DPRD,

Adapun fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Pesisir Barat adalah:

#### 1. Fungsi

Dewan perwakilan daerah kabupaten pesisir barat mempunyai fungsi :

- a. Fungsi legislasi, yaitu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah.
- b. Fungsi anggaran yaitu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk menyusun dan menetapkan APBD bersama-sama pemerintah daerah.
- c. Fungsi pengawasan yaitu, fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah baik dalam bentuk pelaksanaan APBD maupun kegiatan pemerintahan lainnya.

#### 2. Tugas dan Wewenang

Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pesisir barat mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :

- a. Membentuk peraturan daerah bersama bupati

- b. Membahas dan memberikan persetujuan perancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh bupati.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD kabupaten pesisir barat
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan.
- e. Meminta laporan keterangan pertanggung jawabkan bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Memberikan persetujuan terhadap perencanaan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Memberikan persetujuan rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- i. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat adalah lembaga demokrasi perwakilan yang paling dekat dengan konstituennya semakin meningkatnya tuntutan demokratisasi, maka jadi penting adanya optimalisasi fungsi dan peranan DPRD, karena DPRD memiliki posisi dan peranan sebagai penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintah didaerah pada era perubahan politik yang semakin demokratis justru yang menjadi fokus utama bagi keseimbangan penyelenggaraan pemerintah didaerah adalah upaya meningkatkan

fungsi dan peranan DPRD dengan membangun kinerja produktif dan tingkat profesional yang tinggi.

Oleh karena itu, DPRD memiliki peran sebagai lembaga yang turut mengendalikan dan mitra dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh eksekutif menurut undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah , undang-undang 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, dan peraturan pemerintah no 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ,serta peraturan DPRD nomor 17 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD kabupaten pesisir barat bahwa alat kelengkapan DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD
- b. Badan musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan legislasi daerah
- e. Badan anggaran
- f. Badan kehormatan
- g. Alat kelengkapan lain di perlukan dan di bentuk oleh rapat paripurna

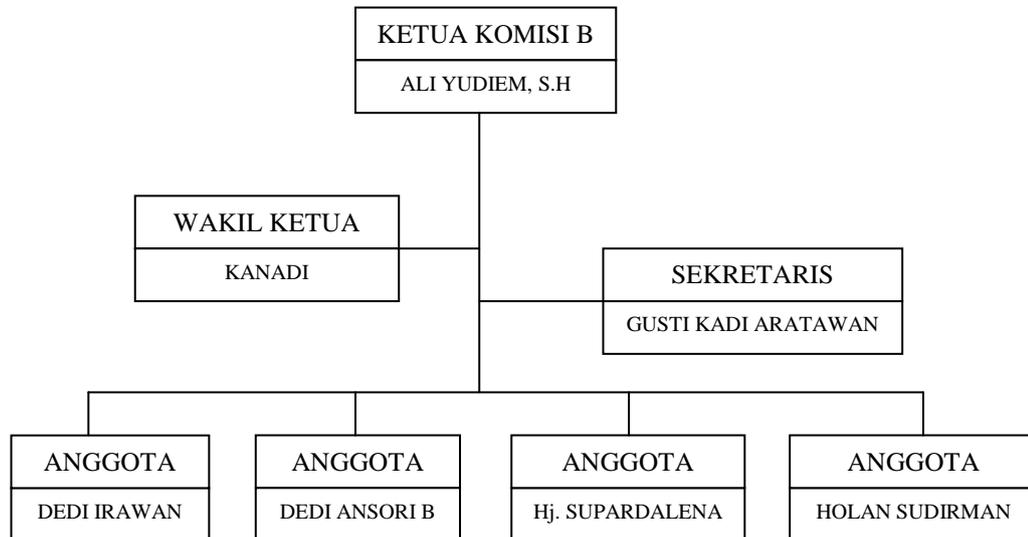
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari fraksi-fraksi yang merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD dan bukan merupakan alat kelengkapan DPRD untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya DPRD di bantu oleh sekretariat DPRD yang di pimpin oleh sekretaris DPRD.

Sesuai Dengan Ketentuan pasal 38 ayat (1) peraturan DPRD Nomor 17 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD kabupaten pesisir barat komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi DPRD kabupaten pesisir barat meliputi komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D, dengan masing-masing bidang, sebagaimana dimaksud pada pasal 39 peraturan DPRD nomor 17 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD kabupaten pesisir barat. Komisi B, bidang ekonomi dan keuangan meliputi :

- a. perindustrian dan perdagangan
- b. koperasi dan usaha kecil menengah (UKM)
- c. BUMN / BUMD dan dunia usaha lainnya
- d. Pendapatan dan asset daerah
- e. Perbankan dan penanaman modal
- f. Ketahanan pangan dan pertanian
- g. Kehutanan dan perkebunan
- h. Perternakan dan perikanan

Berikut merupakan struktur organisasi kepengurusan komisi B DPRD Kabupaten Pesisir Barat, yaitu:

**Gambar 3. Susunan Personalia Kepengurusan Komisi B DPRD Kabupaten Pesisir Barat**



*Sumber: Sekretariat DPRD Kab.Pesisir Barat Tahun 2015*

#### **D. Gambaran Persatuan Masyarakat Petani Repong Damar (PMPRD)**

Persatuan masyarakat petani repong damar yang disingkat PMPRD didirikan tanggal 25 Agustus 2007. Pada tahun 2000-2004 keanggotaan PMPRD adalah individu-individu atau perseorangan. Setelah melakukan perencanaan strategis pada bulan juli 2004 maka keanggotaan PMPRD berubah menjadi kelompok-kelompok tani, kelompok pemuda, kelompok perempuan atau kelompok masyarakat sehingga secara resmi sejak tanggal 25 agustus 2007 organisasi persatuan masyarakat petani repong damar menjadi organisasi rakyat. Keanggotaan ini merupakan sebuah forum yang disebut dengan majelis forum anggota (MFA). Hingga saat ini keanggotaan PMPRD berjumlah 32 kelompok yang tersebar disepanjang pesisir kroi.

## 1. Visi dan misi

Visi PMPRD adalah “Terciptanya masyarakat petani repong damar yang sejahtera berbasiskan ekonomi yang kuat melalui pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan lestari”. Sedangkan misi PMPRD adalah memperjuangkan terciptanya masyarakat petani repong damar yang sejahtera melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat, pembelaan hak-hak masyarakat, pelestarian dan pengembangan repong dan sumberdaya alam, serta pengembangan organisasi dan perluasan jaringan mitra.

## 2. Bidang Program PMPRD

- a. Pembelaan hak-hak rakyat
- b. Pelestarian dan pengembangan repong damar dan sumberdaya alam
- c. Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat
- d. Pengembangan organisasi dan perluasan jaringan mitra

## 3. Kegiatan PMPRD

Dalam menjalankan visi dan misi organisasi melalui program kerja yang telah dilakukan, pengurus PMPRD telah menjalin hubungan kemitraan. Aktifitas-aktifitas yang dilakukan dalam program diantaranya:

- a. Program dukungan *Small Grants Programme for Operations to Promote Tropical Forests (SGP-PTF) United Nation Development Programme (UNDP)* yaitu, program yang didukung oleh SGP-PTF UNDP adalah program yang diupayakan untuk membangun dukungan multipihak terhadap pengelolaan *repong* damar yang merupakan kearifan lokal

masyarakat kroi sebagai sebuah dunia *agroforest*. Kegiatan dilaksanakan dari bulan September 2005 sampai dengan bulan Februari 2007.

Dengan dukungan sepenuhnya dari SGP PTF-UNDP dalam hal ini sekretariat PMPRD sebagai salah satu penerima hibah melakukan beberapa kegiatan :

1. Menciptakan alternatif-alternatif nilai tambah ekonomi *repong* damar seperti produksi vernis, melakukan inventarisasi dan pelatihan tanaman obat serta pendampingan pilot proyek untuk pengembangan tanaman obat.
2. Melakukan survey dan assessment pasar produk damar mata kucing kroi.
3. Pengorganisasian pedagang-pedagang pengepul damar untuk menciptakan akses pasar langsung sehingga akan menciptakan pemasaran getah damar yang menguntungkan semua pihak.
4. Melakukan diskusi dan refleksi bulanan dan refleksi berkala kepada pedagang pengepul dan kelompok-kelompok tani, kelompok perempuan, organisasi kepemudaan, radio komunitas sebagai basis anggota PMPRD.
5. Beberapa aktifitas yang sifatnya insidental seperti; investigasi, diskusi non formal, penguatan basis, kampanye lingkungan hidup.

Dalam melakukan program tersebut sekretariat PMPRD selalu mengajak dan melibatkan unsur-unsur yang masuk dalam sistem organisasi rakyat PMPRD yaitu 33 anggota PMPRD.

Alternatif nilai tambah ekonomi *repong* damar. Program ini dirancang dalam upaya menciptakan dan menggali potensi-potensi yang ada dalam *repong* damar yang bertujuan untuk menambah nilai ekonomi masyarakat secara kreatif dan inovatif yaitu:

1. Produksi vernis, produksi vernis dilakukan oleh unit produksi LKM-PMPRD. Produksi dilakukan baru sebatas untuk sample dan dijual di beberapa produksi tradisional mebel di kroi.
2. Inventarisasi jenis-jenis tanaman obat yang banyak ditemukan dalam *repong* damar seperti ; cakar ayam, tapak liman, temu putih, bengle, pegagan, telawak, browali, kayu pasak bumi, buah makasar, mahkota dewa, meniran dll.
3. Pelatihan pemanfaatan tanaman obatterhadap pengetahuan pengenalan tentang obat-obatan, pemanfaatan tanaman obat, kegunaan tanaman obat sampai pada produksi tanaman obat dalam bentuk kapsul.
4. Melakukan pendampingan untuk pengembangan tanaman obat, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kunjungan lapangan, diskusi dan Tanya jawab seputar tanaman obat dan isu-isu lain yang berkaitan dengan penguatan basis anggota organisasi.
5. Pengembangan unit usaha simpan pinjam LKM PMPRD, kegiatan ini diikuti oleh 12 kelompok tani, kelompok perempuan anggota PMPRD.

Pengorganisasian pedagang pengepul kampung . Ada ribuan petani damar, ada sekitar 200-500 orang pedagang pengumpul yang tersebar di 53 desa penghasil getah damar dan ada 6-10 orang pedagang besar di kota kroi.

Kenyataannya sampai saat ini wadah bagi para pedagang pengumpul kampung dan pengusaha-pengusaha damar di kota krui belum ada, walaupun upaya-upaya sudah dilakukan termasuk menjalin kolaborasi dengan dinas koprindag. Sampai saat ini Asosiasi pedagang damar belum terbentuk, padahal harapan terhadap lembaga ini adalah bagaimana wadah ini dapat menentukan standar mutu dan standar harga damar mata kucing krui mengingat produksi resin nasional adalah 80% berasal dari krui.

Sekretariat PMPRD melakukan upaya-upaya baru sebatas pengorganisasian para pedagang pengumpul tingkat kampung baru ditiga desa yaitu desa penengahan laay, desa gunung kemala, dan desa pahmungan. Kegiatannya adalah membangun komunikasi melalui diskusi-diskusi terarah, pengumpulan database tentang produksi dan produktifitas dan membangun image tentang isu-isu strategis yang harus dilakukan kedepan.

Selanjutnya *Assessment* sub sektor dan rantai nilai damar mata kucing krui. *Assessment* dilakukan di desa gunung kemala, pahmungan, penengahan laay, pedagang damar di kota krui, dinas koprindag dan dinas Kehutanan Lampung Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui dan mengumpulkan database pedagang damar seperti produksi, produktifitas, kegiatan sortir dan akses pasar. Respon positif dari para petani dan pedagang pengumpul terhadap kegiatan ini dikarenakan kegiatan dilakukan secara kekeluargaan, diskusi dan Tanya jawab berkaitan dengan isu-isu dan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan menuju

perdagangan yang menguntungkan semua pihak. Kegiatan ini juga sebagai bentuk pembelajaran untuk mengembangkan situs-situs pengelolaan SDA yang dikelola secara berkelanjutan. Respon positif dari pemerintah daerah Lampung Barat terhadap kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemda dalam mewujudkan Lampung Barat menjadi kabupaten konservasi. Hingga saat ini kapasitas produksi damar mata kucing di kroi belum mempunyai data akurat.

- b. Program dukungan *Multistakeholder Forest Management* (MFD) *Devartemen for International Development* (DFID), adalah program yang dijalankan oleh sekretariat PMPRD dengan dukungan *Multistakeholder Forest Management* (MFP) *Devartement for International Development* (DFID) berjudul: pengembangan situs-situs pembelajaran tentang pengelolaan *repong* damar di pesisir kroi. Program ini dilaksanakan dari bulan Desember 2005 sampai dengan bulan November 2006.

Tujuan program ini adalah adanya model pengelolaan *repong* damar sebagai situs pembelajaran tentang pengelolaan *repong* damar secara berkelanjutan di pesisir kroi. Sedangkan untuk output nya adalah (1) adanya pengelolaan kawasan *repong* damar oleh masyarakat yang berpotensi sebagai lokasi model untuk resolusi konflik dalam menekan laju penebangan damar; (2) adanya lokasi model pengembangan *repong* damar berdasarkan aturan lokal dalam hal perawatan dan pengamanan hasil *repong* damar; (3) adanya usaha kecil sebagai model belajar dalam

hal pengembangan ekonomi masyarakat; (4) adanya peningkatan SDM pengelola proyek dalam mengembangkan lokasi belajar.

Adapun aktifitas yang dilakukan diantaranya adalah fasilitasi pembuatan peraturan desa atau peraturan pekon untuk menekan laju penebangan damar (pengumpulan data base, diskusi kelompok, diskusi dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat, pelatihan pembuatan peraturan desa atau peraturan pekon, konsultasi publik tentang draf peraturan desa atau peraturan pekon yang telah dibuat oleh tim). Kegiatan ini dilakukan di pekon Negeri Ratu Ngaras Kecamatan Bengkunt.

Dalam proses mempertahankan kelestarian fungsi *repong* damar, hingga kini masyarakat petani *repong* damar masih menghadapi tantangan yang berat utamanya dalam perdagangan belum lagi ditambah dengan menjamurnya industry pengelolaan kayu (*sawmill*) yang sebagian produksinya adalah kayu damar. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor diantaranya:

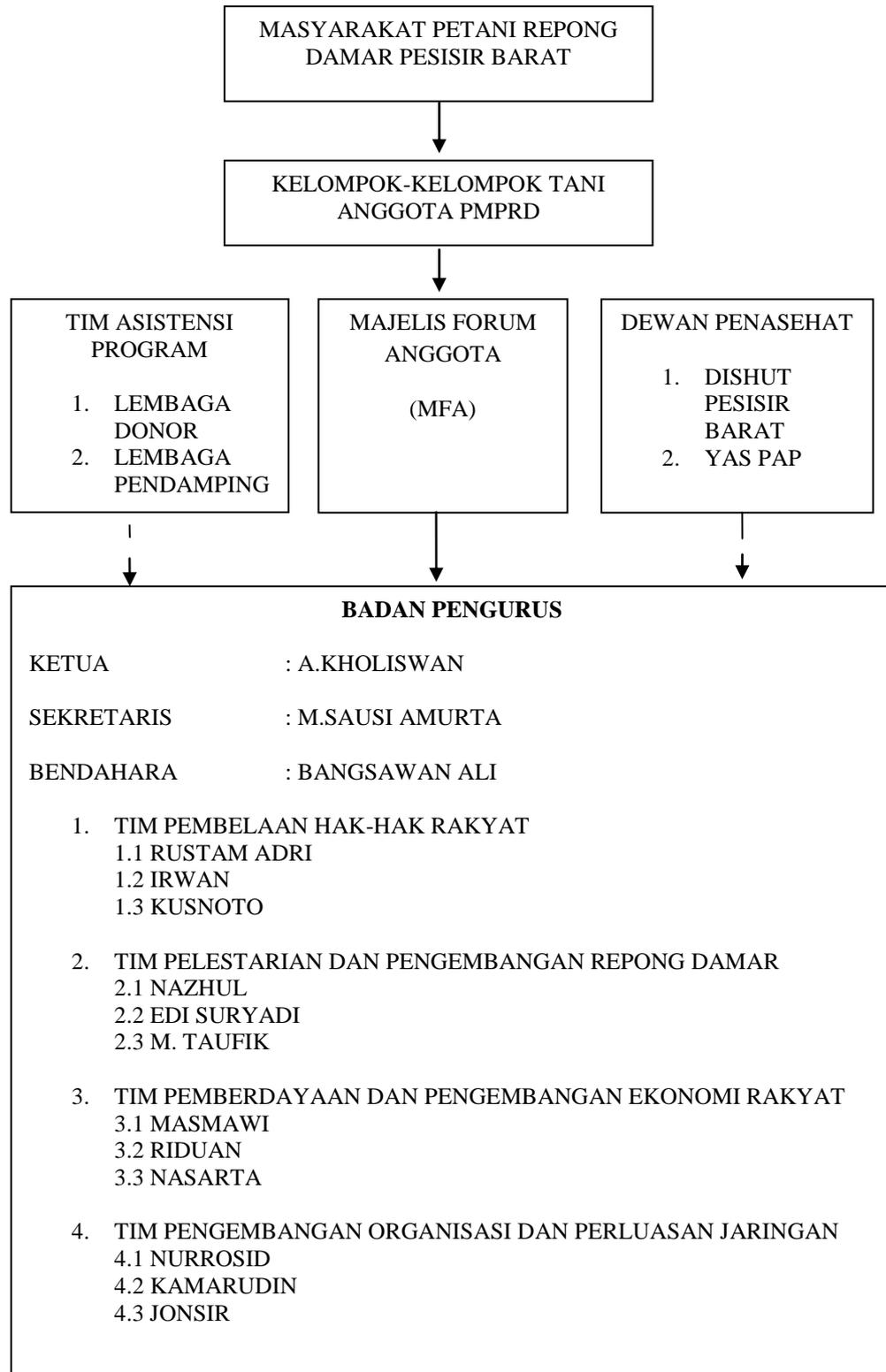
1. Sistem perdagangan belum menguntungkan semua pihak terutama petani damar.
2. Kesadaran masyarakat terutama generasi muda dalam upaya melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan sangat kurang.
3. Harga kayu damar relatif tinggi sehingga menyebabkan masyarakat berpikir praktis untuk menjual kayu damarnya.
4. Adanya faktor internal dan faktor-faktor eksternal lainnya.

Keberhasilan dalam pengelolaan *repong* damar tidak akan terwujud secara berkelanjutan tanpa dukungan multipihak baik antara masyarakat petani yang ditunjang oleh ikatan sosial yang kuat antara masyarakat dan para pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah.

#### **4. Susunan Organisasi**

Struktur organisasi PMPRD terdiri dari anggota PMPRD (Majelis Forum Anggota); Dewan Perwakilan Anggota; Dewan Penasehat; dan Badan Pengurus Harian. Anggota PMPRD yang disebut Majelis Forum Anggota adalah kelompok-kelompok tani, kelompok pemuda, kelompok perempuan, atau kelompok masyarakat yang peduli dan berperan aktif dalam pengelolaan *repong* damar dan sumber daya alam lainnya. Dewan Perwakilan anggota adalah perwakilan setiap kelompok yang menjadi anggota PMPRD yang direkomendasikan oleh kelompoknya. Berikut merupakan struktur organisasi kepengurusan Persatuan Masyarakat Petani Repong Damar Kabupaten Pesisir Barat, yaitu:

**Gambar 4. Struktur Pengurus Persatuan Masyarakat Petani Repong Damar (PMPRD) Kabupaten Pesisir Barat**



*Sumber: Dokumen AD/ART PMPRD Kabupaten Pesisir Barat*

**Tabel 4. Daftar Anggota PMPRD di Kabupaten Pesisir Barat**

No	Nama kelompok	Nama ketua	Nama DPKT	Jmlh anggota	Alamat kelompok
1	Tunas karya	Tukiran	Tukiran	23	Way rilau pekon mon kec.ngambur
2	Angon saka	Rustam adri	Rustam adri	30	Pekon parda haga kec.lemong
3	Bina karya mandiri	Maswawi	Maswawi	89	Pekon penyandingan kec.bengkunat
4	Bina usaha	Yunila	Yunila	22	Way utong kec.lemong
5	Beguai jejama	Hadidulloh	Hadidulloh	18	Negri ratu ngaras kec.bengkunat
6	Rakom suara petani	Effendi bawor	Effendi bawor	74	Pekon pahmungan kec.pss.tengah
7	Seangkonan	Kesuma	Kesuma	17	Pekon penengahan kec. Karya penggawa
8	Gelanggang	Sarmada	Sarmada	16	Negri ratu ngaras kec. Bengkunat
9	Jaya makmur	Muzakkir t	Muzakkir t	16	Pekon penengahan kec. karya penggawa
10	seandanan	Albizar	Albizar	24	Pekon pahmungan kec. Pss.tengah
11	Alam lestari	Mursalin	Mursalin	19	Pekon way sindy kec.karya penggawa
12	Balin sugih	Hastin	Hastin	17	Pekon Malaya kec.lemong
13	KSM kakap merah	Sri mugl utami	Sri mugl utami	30	Pekon kutajawa kec.bengkunat
14	Citra usaha	Abd.makmur	Abd.makmur	23	Pekon cahya negri kec.lemong
15	Sumber rejeki	Pramono	Pramono	16	Pekon penyandingan kec. Bengkunat
16	Harjo makmur	Yasir	Yasir	16	Suko harja kec bengkunat
17	Suko harjo	Suwitno	Suwitno	24	Pekon suka marga kec. Bengkunat
18	Mekar jaya	Arifin.s	Arifin.s	17	Talang kebudu tenumbang
19	Mayasari	Nangsis	Nangsis	22	Mulang maya ngaras
20	Titian jaya	Effendi	Huzami	16	Pekon Malaya kec.lemong
21	Maja sari	Beny wijaya	Joni safari	65	Pekon tenumbang kec.pss.selatan
22	Bina karya	Edy suryadi	Edy suryadi	18	Mendati jaya kec.ngambur
23	Karya murni	Kusnoto	Kusnoto	27	Ti.kakabu Malaya kec.lemong
24	Karya tani	Muhtasor	Sudiono	16	Mendati kec.ngambur
25	P3GK	Budi setiawan	Deny ishanda	256	Pekon gunung kemala kec.pss tengah
26	Damar harapan jaya	Hasmuddin	Khotmir.s	40	Pekon gunung kemala kec.pss tengah

27	Karya maju	Sanusi	Nasarta	25	Pekon penengahan kec.lemong
28	Ulok bamban	Mulyadi	Azwan	15	Pekon gunung kemala kec.pss.tengah
29	Karya bakti	Nazhul	Nazhul	19	Pekon Malaya kec. Lemong
30	Batu bulan	Sumardi	Sumardi	21	Ti. Batu bulan kec. Lemong
31	Marga tenumbang	Hery feruza	Erwin	34	Tenumbang kec. Pss.selatan
32	Sinar jaya	Munzir.s	Munzir.s	42	Gedung cahya kuningan
33	Marga bengkurat	mahmud	mahmud	27	Way henii kec.bengkunat

*Sumber: Dokumen AD/ART PMPRD Kabupaten Pesisir Barat*

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Aktor yang terlibat dalam proses *agenda setting* kebijakan pelestarian *repong* damar di Kabupaten Pesisir Barat antara lain adalah, dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat, dan Persatuan Masyarakat Petani Repong Damar (PMPRD) yang banyak berperan di tahap awal. Aktor yang terakhir adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki peran sebagai pemegang legitimasi untuk memasukkan isu perlindungan pohon damar terhadap kelestarian lingkungan ke dalam agenda kebijakan pemerintah legislatif (*prolegda*). Antara pemerintah eksekutif dan para NGO cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat. Sedangkan hubungan antara pemerintah eksekutif dan legislatif kurang terjalin dengan baik, karena kurangnya komunikasi diantara keduanya.
2. Peran yang dimainkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat terhadap *agenda setting* kebijakan pelestarian *repong* damar adalah menjadikan hal itu kenyataan (*make it happen*) yakni dengan peran aktif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Pj. Bupati Pesisir Barat Bapak Qodratul

Ikwan beliau menyatakan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan kepada DPRD untuk dibahas dalam prolegda (Program Legislasi Daerah) di tahun 2016 ini. Ide atau gagasan ini kemudian dimatangkan oleh berbagai kajian ilmiah yang dilakukan oleh kalangan partisipatif dan instansi-instansi terkait bekerjasama dengan kalangan teknokratik yang melibatkan para akademisi dari perguruan tinggi yang selanjutnya dipublikasikan.

Nilai atau *values* dalam *agenda setting repong* damar, pada umumnya akan menyentuh aspek *metapolicy*, karena menyangkut hakikat, perspektif, sikap, dan perilaku yang tersembunyi atau yang dinyatakan secara terbuka dari aktor-aktor yang bertanggungjawab dalam perumusan atau pembuatan kebijakan publik menurut Hodgkinson dalam Wahab (2012:108). Proses penyusunan agenda pelestarian *repong* damar di Kabupaten Pesisir Barat lebih dimuat oleh nilai kebijakan. Karena pada kenyataannya memang nilai kebijakan yang merupakan salah satu nilai dalam sebuah kebijakan telah nampak dalam kebijakan pelestarian *repong* damar di Kabupaten Pesisir Barat.

## **B. Saran**

1. Kurang baiknya jalinan komunikasi antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan DPRD Kabupaten Pesisir Barat justru merupakan salah satu hambatan yang cukup berarti dalam upaya melahirkan kebijakan terkait pelestarian *repong* damar di Kabupaten Pesisir Barat. Terlebih lagi masyarakat sendiri sudah mulai kritis dalam menyikapi persoalan-persoalan penebangan yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, seharusnya komunikasi intensif antara Dinas Kehutanan dan

Perkebunan dengan DPRD Kabupaten Pesisir Barat dapat terjalin dengan baik. Kemudian lembaga-lembaga swadaya masyarakat, baik itu dari kalangan ornop maupun kelompok masyarakat seperti PMPRD Kabupaten Pesisir Barat harus mampu menjaga keberlanjutan usahanya serta terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya pelestarian *repong* damar dengan tetap menjaga kredibilitas dan tetap memomorsatukan kepentingan rakyat serta tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

2. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam proses perumusan kebijakan pelestarian *repong* damar di Kabupaten Pesisir Barat. Sebaiknya isu kebijakan pelestarian *repong* damar di Kabupaten Pesisir Barat diformulasi. Karena kebijakan pelestarian *repong* damar tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan dan tentunya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat serta melibatkan aktif masyarakat dalam segala proses kebijakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Birkland, Thomas. 2005. *An introduction to the policy process (theories, concept and models of public policy making)*. New York
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Koestoro, Budi dan Basrowi. 2006. *Strategi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Surabaya: Media Oetama Press
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia
- Parsons, Wayne. 2014. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R7&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2013. *Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: C A P S

### **Jurnal / Skripsi / Dokumen – Dokumen**

Herawati, Tuti. 2012. *Perjalanan Multiabad Repong Damar Kajian Aspek Tata Guna Lahan*. Jurnal: Badan Litbang Kementerian Kehutanan

Juhadi. 1995. “*Repong Damar*” *Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berkelanjutan di desa way sindi krui Lampung Barat*. Skripsi: Universitas Indonesia

Lubis, Zulkifli. 1997. *Repong Damar : Kajian Tentang Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Lahan Hutan di Pesisir Krui, Lampung Barat*. Bogor: Center For International Foresty Research.

Michon, G., de Foresta H., Kusworo A. and P. Levang (2000). Chapter 7. The Damar Agro-Forests of Krui, Indonesia: Justice for Forest Farmers. In C. Zerner (Editor): *People, Plants and Justice*. Columbia University Press.

Nainggolan, Valentina. 2011. *Analisis Populasi Jenis Primata di Repong Damar Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Krui Lampung Barat*. Bandar Lampung: Unila (Skripsi).

Purwanto, Hadi. 2015. *Analisis Kebijakan Pemindehan Pusat Pemerintahan Dari Kota Bandar Lampung ke Kabupaten Lampung Selatan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Dan Perubahan Ekonomi Masyarakat*. Skripsi: Universitas Lampung

### **Website**

<http://cybex.pertanian.go.id/materilokalita/detail/5160> di akses pada 13 September 2015 Pukul 16.13 WIB

[http://www.lampost.co/berita/populasi-pohon-damar-di-pesisir-barat-terus menyusut](http://www.lampost.co/berita/populasi-pohon-damar-di-pesisir-barat-terus-menyesut) di akses pada 23 Agustus 2015 Pukul 00.19 WIB

[http://www.mongabay.co.id/2015/04/29/hutan-damar-terjaga-namun warga masih-belum-sejahtera/](http://www.mongabay.co.id/2015/04/29/hutan-damar-terjaga-namun-warga-masih-belum-sejahtera/) di akses pada 25 Agustus 2015 Pukul 20.00 WIB

<http://www.teraslampung.com/2014/05/repong-damar-krui-pernah-terancam-aksi.html> di akses pada 25 Agustus 2015 Pukul 20.45 WIB